

# RENSTRA

## Rencana Strategis

Tahun 2023-2026



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan  
Pertanahan Kabupaten Boalemo





## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 dapat diterbitkan. Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) selaku pelaksana teknis. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dan arahan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo ini, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan lima tahun ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja program dan kegiatan serta rencana tahunan agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo lebih kongkrit dan terukur.

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 yang telah disusun ini tak akan berarti tanpa direalisasikan dengan pelaksanaan yang baik dan tuntas. Komitmen dan motivasi sangat dibutuhkan demi keberhasilan mengaktualisasikan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Harapan kami, Renstra tahun 2023-2026 ini dapat dijadikan referensi dan ilustrasi pembelajaran jangka panjang dan menengah serta sekaligus menjadi acuan rencana kerja tahunan.

Penyusun,



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

### IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 tahun 2017 sebagai manifestasi atas Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Boalemo periode 2023-2026 dan sekaligus amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur perumahan, permukiman, perhubungan dan pertanahan yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo guna mencapai sasaran-sasaran strategis pembangunan di Kabupaten Boalemo. Dalam perjalanannya program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergitas antara pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), pemerintah Provinsi Gorontalo, unsur TNI, unsur Kepolisian, dan Lembaga terkait lainnya dengan Dunia Usaha dan masyarakat



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan infrastruktur di bidang perumahan, permukiman, perhubungan dan legalitas tanah milik pemerintah dan kualitas pelayanan yang merata dan berkeadilan.

Akhir kata, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo, kami berharap agar seluruh target program dan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dapat di implementasikan untuk menyukseskan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan di segala bidang, sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan social kemasyarakatan.

**Tilamuta, Januari 2022**



**SYAFRUDIN KADIR LAMUSU, SE.MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19711023 200012 1 003



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyusunan dokumen tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2022. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal dan Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan serta instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pejabat (Pj.) Kabupaten Boalemo sampai pada saat dilantiknya bupati dan Wakil Bupati Boalemo terpilih pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2024.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Boalemo Ir. H. Anas Jusuf pada tanggal 22 Mei 2022 mendatang, maka perlu disusun rancangan dokumen Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 psebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah semasa kekosongan pejabat politik di Kabupaten Boalemo.

### 1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

24. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boalemo 2012 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291).

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### A. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo adalah memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang perumahan, permukiman, perhubungan dan pertanahan Kabupaten Boalemo sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan harmonis serta berkesinambungan.

#### B. Tujuan

Adapun tujuan sebagai berikut adalah :

1. Sebagai arah dan pedoman bagi personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator



## **RENSTRA 2023-2026**

*Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo*

2. kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2023-2026 dapat tercapai;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
5. Sebagai pedoman Dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan jasa sarana dan prasarana di bidang perumahan rakyat, Permukiman, perhubungan dan pertanahan yang handal;
6. Sebagai pedoman Dinas dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan;
7. Sebagai tolok ukur Dinas dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam evaluasi penilaian kinerja atas pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2023-2026.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat daerah



# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

- 2.2 Sumber Daya Perangkat daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah
- 3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

## BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Telaahan

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

## BAB VII PENUTUP



# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo tertuang dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo, dan selanjutnya di rubah dalam bentuk Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Balemo di bidang perumahan rakyat, kawasan Permukiman, perhubungan dan pertanahan berdasarkan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perumahan Rakyat, bidang Kawasan Permukiman, bidang Perhubungan serta bidang pertanahan. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

Perumahan, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo menyelenggarakan kewenangan :

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan;
2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan dan pelayanan perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan;
3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan UPTD dalam lingkup tugas dinas;
4. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi data perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan serta memberikan laporan dan penyuluhan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
3. Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan, yang membawahi :
  - a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
  - b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
4. Bidang Permukiman, yang membawahi :
  - a. Teknik Pengairan
  - b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
5. Bidang Perhubungan, yang membawahi :
  - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Keselamatan Jalan



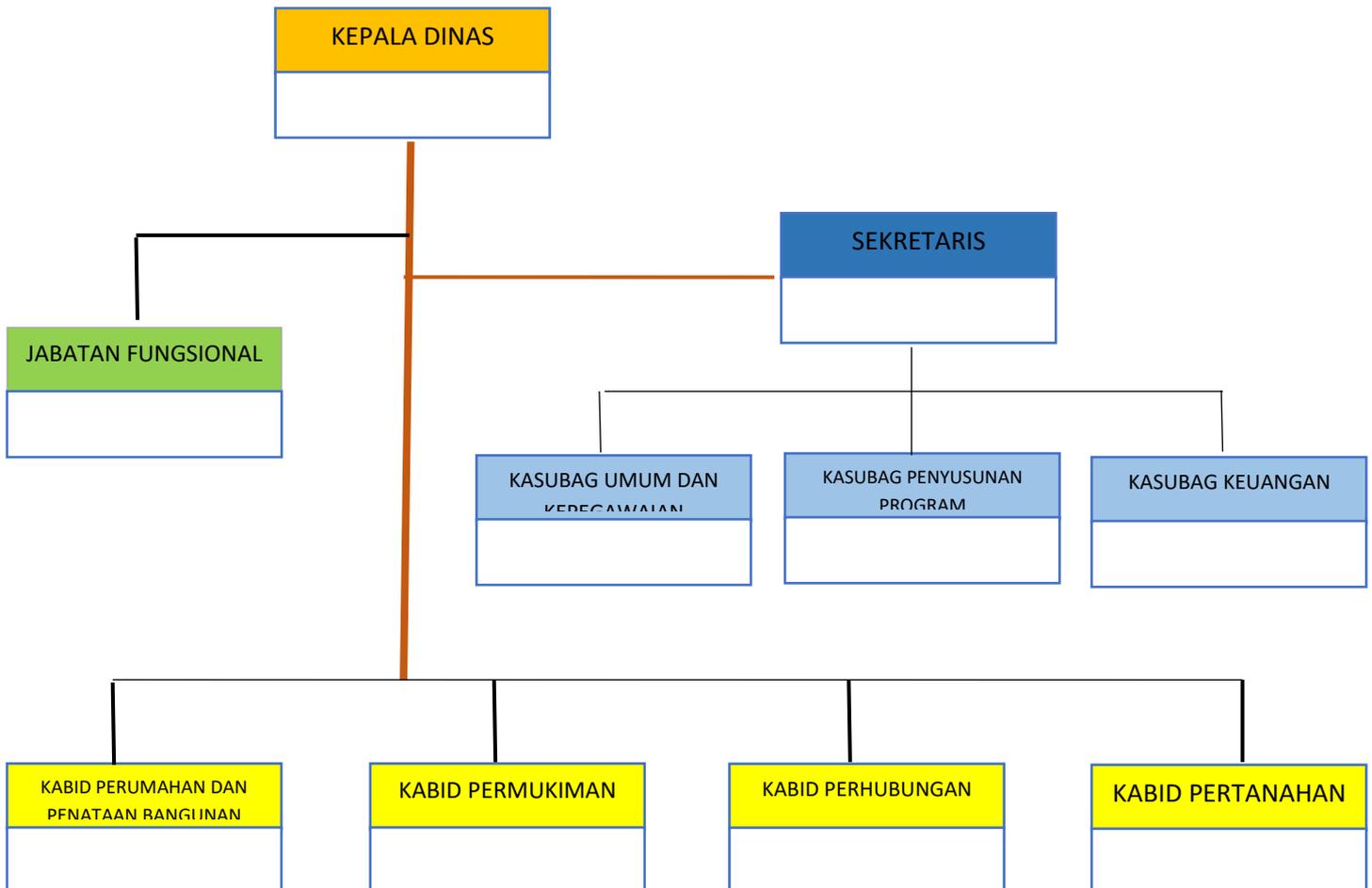
# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

- b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran
- 6. Bidang Pertanahan, yang membawahi :
  - a. Penata Pertanahan
  - b. Penata Pertanahan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dapat digambarkan sebagai berikut berikut.

**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo**



Dari struktur jabatan yang ada dijabarkan dalam job description dengan rincian sebagai berikut :



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

### **Kepala Dinas**

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas merupakan pejabat yang diberikan Kewenangan oleh Bupati dalam urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis lingkup perencanaan pelayanan administrasi di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan secara terpadu agar sasaran pelaksanaan sesuai harapan.
- b. Mengkoordinasikan program/kegiatan dan penganggaran lintas sektor, berdasarkan tugas dan fungsi agar pelaksanaan efisien dan efektif;
- c. Membina dan mengarahkan unit pelaksana teknis berdasarkan pedoman agar terciptanya keterpaduan program;
- d. Menyelenggarakan ketatausahaan unit berdasarkan aturan yang ada agar tertibnya administrasi perkantoran;
- e. Menindaklanjuti program/kegiatan administrasi perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan secara teknis dalam lingkup kewenangan agar adanya kesinambungan program;



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

- f. Mengevaluasi program/kegiatan lintas sektor berdasarkan rencana kerja agar diperoleh data perkembangan dan pertumbuhan bidang perhubungan dan pertanahan;
- g. Melaporkan hasil program/kegiatan kepada pimpinan dalam bentuk dokumen sebagai laporan hasil pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaksanakan kegiatan kedinasan yang lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### 2. Sekretaris Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. mengoordinasikan rencana program dan kegiatan serta penyusunan bahan laporan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja Dinas;
- b. mengoordinasikan kegiatan operasional perencanaan, administrasi umum, ketatausahaan, perpustakaan, arsip, kepegawaian, kehumasan, protokol, pengelolaan perlengkapan rumah tangga badan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup sekretariat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan Dan Pertanahan;



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

- d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat berupa pengkajian kebijakan teknis di bidang sekretariat;
- e. mengoordinasikan penyusunan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- f. memfasilitasi penyusunan bahan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan;
- g. memfasilitasi penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan (SP);
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan;
- i. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan;
- j. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- l. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- m. memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- o. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

Sekretariat Dinas terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Penyusunan Program, dan Sub Bagian Keuangan, dengan tugas pokok sebagai berikut :

### **a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang kepegawaian, umum, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- c. menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris;
- e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
- f. mengelola data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi;
- g. mengembangkan kapasitas SDM Aparatur;
- h. menyelenggarakan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- i. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- j. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

- k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- l. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya;
- n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT;
- p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;
- r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
- s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
- t. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- u. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telaahan bidang-bidang), kearsipan dinas;
- v. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; dan
- w. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

### **b. Sub Bagian Penyusunan Program**

Sub Bagian Penyusunan Program, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang mengimpun rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kegiatan;
- b. Menyiapkan Bahan Kerja;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklarifikasi dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan progrm dan kegiatan dinas;
- d. Merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka Pengembangan program kerja dinas;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra Dinas, Renja Dinas, KUA-Dinas, PPAS-Dinas dan PPA Dinas;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tugas pembantuan.
- h. Mengkoordinasikan penyusunan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), indeks kepuasan masyarakat (IKM)
- i. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya; dan
- l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

### **c. Sub Bagian Keuangan**



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

Sub Bagian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu dan pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Rencana Kegiatan;
  - b. Menyiapkan Bahan Kerja;
  - c. Melaksanakan penata usahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Mengkoordinasikan penyusunan RKA-Dinas dan DPA Dinas;
  - f. Melaksanakan inventarisasi verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada keuangan atau pengadministrasian keuangan;
  - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan;
  - i. Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi pembukuan;
  - j. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- 
1. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

m. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

### 3. Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan

Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang perumahan dan penataan bangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan dalam hal penanganan perumahan formal, perumahan swadaya dan perumahan khusus serta penataan bangunan gedung sesuai ketentuan
- b. Melaksanakan penyusunan Data Base perumahan dan bangunan gedung
- c. Menyusun rencana program, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan di sektor perumahan dan tata bangunan
- d. Menyelenggarakan pembangunan termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharaan sarana/prasarana perumahan dan bangunan gedung
- e. Melaksanakan kebijakan dalam hal penyediaan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA)
- f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan teknis di sektor perumahan dan tata bangunan
- g. Melaksanakan penyuluhan teknis di sektor perumahan dan tata bangunan
- h. Merumuskan dan mensosialisasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan dan tata bangunan
- i. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan

### 4. Kepala Bidang Pemukiman



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

Bidang Permukiman, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan dalam hal pengembangan kawasan permukiman, penanganan kawasan kumuh serta pengembangan sistem penyediaan air minum/air limbah/drainase lingkungan/persampahan sesuai ketentuan.
- b. Melaksanakan penyusunan Data Base bidang permukiman berupa ruang lingkup kawasan kumuh perkotaan/perdesaan, cakupan pelayanan air minum, akses sanitasi/air limbah, jaringan drainase, jaringan jalan lingkungan serta cakupan pelayanan persampahan dan sarana/prasarana permukiman lainnya.
- c. Menyusun rencana program, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan di sektor permukiman.
- d. Menyelenggarakan pembangunan termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharaan sarana/prasarana kawasan permukiman.
- e. Melaksanakan Tugas Pembinaan dan Pengelolaan Teknis di bidang penanganan kawasan permukiman.
- f. Melaksanakan penyuluhan teknis di bidang penanganan kawasan permukiman.
- g. Merumuskan dan mensosialisasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang permukiman.
- h. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

### 5. Bidang Perhubungan



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

Bidang Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dinas di bidang perhubungan yang menyangkut pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Perhubungan laut.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dan kegiatan di bidang Perhubungan darat dan perhubungan laut;
- b. Pelaksanaan pengawasan, pengaturan dan pengendalian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang Perhubungan Laut;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang Perhubungan Laut;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang Perhubungan membawahi :

- a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Keselamatan Jalan
- b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran

### **Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Keselamatan Jalan**

Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Keselamatan Jalan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan, pengendalian, fasilitasi penyelenggaraan angkutan darat dan Keselamatan Jalan.



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Keselamatan Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Angkutan Darat dan Keselamatan Jalan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan darat;
- c. Pembinaan pengusaha angkutan umum;
- d. Pemantauan dan evaluasi angkutan darat;
- e. Pengaturan dan penataan angkutan darat;
- f. Pengendalian angkutan darat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan manajemen lalu lintas, serta Keselamatan jalan;
- h. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas dan keselamatan jalan;
- i. pembinaan dan pengembangan angkutan tradisional;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

### **Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran**

Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Lalu Lintas Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran;



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

### 6. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dan kegiatan di bidang Pertanahan;
- b. Penyusunan perencanaan teknis operasional, fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah;
- c. Pengkoordinasian pelayanan izin lokasi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### **2.11 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sumber daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana kantor.

#### **2.1.2 Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo didukung oleh sumberdaya manusia sebagai penggerak roda organisasi yang dapat diuraikan dengan keadaan pegawai sebagaimana dalam tabel berikut :



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

**Tabel 2.1**  
**Keadaan Pegawai**  
**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan**  
**Pertanahan Kabupaten Boalemo Menurut Jabatan Struktural dan**  
**Eselonering**

No.	Nama Jabatan	Eselonering	Jumlah	Keterangan ( terisi )
1	Kepala (Pimpinan Tinggi Pratama)	II.b	1	1
2	Sekretaris (Administrator)	III.a	1	1
3	Kepala Bidang (Administrator)	III.b	4	4
4	Kepala Seksi (Pengawas)	IV.a	2	2
5	Jabatan Fungsional	IV.a	6	6
6	Kepala Sub Bagian (Pengawas)	IV.a	3	3
<b>Jumlah</b>			<b>17</b>	<b>17</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Disperkimhubtan Kab. Boalemo, Tahun 2022

Jumlah pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo per 1 Januari 2022 sebanyak 62 (enam puluh dua) orang PNS, dan 58 (Lima puluh delapan) orang Tenaga Pelaksana Kegiatan, dengan berbagai latar belakang pendidikan, sehingga dari aspek kualitas dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo. Untuk lebih jelasnya keadaan pendidikan pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel berikut ini :



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

**Tabel 2.2**  
**Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan**  
**Pertanahan Kabupaten Boalemo**

No.	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah (Orang)
		PNS (Orang)	CPNS (Orang)	
1	Pasca Sarjana (S-2)	2	-	2
2	Sarjana (S-1)	25	-	25
3	Diploma (D-III)	2	2	4
4	Diploma (D-II)	-	-	-
5	Diploma (D-I)	-	-	-
6	SLTA/SMK/Sederajat	29	-	29
7	SLTP Sederajat	1	-	1
8	SD	2	-	2
J U M L A H		61	0	61

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Disperkimhubtan Kab. Boalemo, Tahun 2022.

Keadaan pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo menurut pangkat dan golongan/ruang dilihat pada table berikut ini :



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

**Tabel 2.3**  
**Keadaan Pegawai**  
**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan**  
**Pertanahan Kabupaten Boalemo**

No.	Klasifikasi			
	Pangkat	Golongan	Ruang	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Madya	IV	D	-
2	Pembina Utama Muda	IV	C	1
3	Pembina Tingkat I	IV	B	1
4	Pembina	IV	A	5
5	Penata Tingkat I	III	D	5
6	Penata	III	C	9
7	Penata Muda Tingkat I	III	B	5
8	Penata Muda	III	A	4
9	Pengatur Tingkat I	II	D	16
10	Pengatur	II	C	10
11	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	3
12	Pengatur Muda	II	A	1
13	Juru Tingkat I	I	D	-
14	Juru	I	C	1
15	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
16	Juru Muda	I	A	-
<b>Jumlah</b>				<b>61</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Disperkimhubtan Kab. Boalemo, Tahun 2022

Jumlah jabatan struktural yang ada menurut Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan terdapat 17 jabatan struktural. Jabatan fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan sesuai dengan Peraturan Bupati 15 Tahun 2022, adalah jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan berlaku yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

### 2.1.3 Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya lainnya berupa sarana dan prasarana kantor seperti tanah, bangunan, peralatan dan perlengkapan kantor baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak.

Adapun sarana dan prasarana pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**

#### **Aset Gedung dan Bangunan**

No	Nama Barang	Uraian		Kondisi
1	Kantor Induk	- Lokasi - Luas Tanah - Asal Usul Tanah - Status Tanah - Luas Bangunan	- Tilamuta - 2635,5 M <sup>2</sup> - Pembelian - Tanah milik Pemda - 0	Baik
2	Terminal Angkutan Umum	- Lokasi - Tipe - Luas tanah - Asal – Usul Tanah - Status tanah - Luas Bangunan	- Tilamuta - C - O - Pembelian - Tanah pembelian	Baik
4	Gedung Pelataran Parkir Mobil pengujian Keliling	- Lokasi - Luas Tanah - Asal – Usul Tanah - Status tanah - Luas bangunan	- Tilamuta - 48 M <sup>2</sup> - Pembelian - Tanah milik pemda - 59 M <sup>2</sup>	Baik
5	Pos Pemungutan Retribusi	- Lokasi - Luas tanah - Asal – Usul tanah - Status tanah - Luas bangunan	- Tilamuta, Paguyaman, mananggu - 30 M <sup>2</sup> - Hibah - Milik Pemda - 20 M <sup>2</sup>	Baik

Sumber : Pengurus Barang pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Disperkimhubtan Kab. Boalemo, Tahun 2022



# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

Tabel 2.5

## Aset Peralatan Kantor

No	Nama Barang	Jumlah	Merk	Kondisi	Ket
1	Kendaraan roda empat	9	Toyota	Baik	- 1 Truk - 2 Minibus
2	Kendaraan roda empat	1	Mitsubishi	Baik	- 3 bus
3	Kendaraan roda dua	13	Honda, Yamaha	Baik	- 5 motor tiger (Rusak) - 8 motor bebek
3	Note book	16	Toshiba, Asus	Baik	- Komputer Note Book
4	Hardisk Eksternal	1	Toshiba	Baik	- Hardisk eksternal
5	Printer	5	Canon	Baik	- Printer
6	Alat uji Emisi	1	Nanhua/NHT-6	Baik	- Alat uji emisi (smoke tester)
7	Alat Platform Timbangan Portable	1	CAS/RW-2601P	Baik	- Alat Platform Timbangan Portable
8	Canon Scan	1	Canon Lide	Baik	- Canon scan
9	Theodolite	1	Nikon w20	Baik	- Theodolite
10	Alat GPS	1	Garmin 6Zs	Baik	- Alat GPS
11	Notebook	1	Acer E1-470	Baik	- Computer notebook
12	Laptop	2	Acer	Baik	- Laptop
13	Mesin Ketik Elektrik	1	Nakajima	Baik	- Mesin ketik elektrik untuk pengujian
14	Komputer PC All In One	1	Acer	Baik	- Komputer PC All In One
15	Sound System	1	Waranti	Baik	- Sound System
16	Pendingin ruangan	5	Panasonic	Baik	- AC

Sumber : Pengurus Barang pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Disperkimhubtan Kab. Boalemo, Tahun 2022

## 2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab I Pendahuluan bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk sebagai implementasi atas Undang-



## RENSTRA 2023-2026

*Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo*

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan berdasarkan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.

Berkaitan dengan hal sebagaimana di atas, maka Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo adalah merger dari beberapa dinas/instansi yaitu Bidang Cipta Karya yang berada di Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Capaian target kinerja program RPD Tahun 2023-2026 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:



# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

## Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK (Nasional)	Target IKK (Supas)	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-		
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH																	
I	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo																
I.1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo																
1	Presentase Penurunan Jumlah Temuan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%
2	Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik				80	80	80	80	80	80	80	80	85	80	100%	100%	100%
3	Nilai SAKIP OPD				B	B	BB	BB	A	BB	B	BB	BB	A	100%	100%	100%
4	Indeks Reformasi Birokrasi				45	50	57	68	75						0%	0%	0%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat				3	3,3	3,5	3,8	4						0%	0%	0%



# RENSTRA 2023-2026

Dinas

6	Persentase Aparatur Yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan				60	65	70	75	80	46	52	55	66,67	80	76,67%	80,00%	78,57%
7	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BIDANG PERUMAHAN DAN PENATAAN BANGUNAN</b>																	
<b>II Mewujudkan suasana kenyamanan atas pemenuhan kebutuhan Dasar Masyarakat</b>																	
<b>II.1 Terwujudnya kawasan Perumahan permukiman yang sehat dan layak huni</b>																	
1	Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni		%		90	90	95	98	100	68	68	62	98	100	132,35%	132,35%	153,23%
2	Panjang drainase yang dibangun		Meter		535	535	600	750	900	8692	8692	7227	750	900	6,16%	6,16%	8,30%
3	Panjang jalan lingkungan yang dibangun		Meter		600	600	700	800	900	515	515	1029	800	900	116,50%	116,50%	68,03%
4	Jumlah kegiatan pengendalian dan pelaporan pengembangan perumahan		Keg		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
5	Jumlah dokumen rencana tata ruang bangunan dan lingkungan perumahan dan permukiman yang tersusun		Keg		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
6	Panjang jalan drainase lingkungan		Meter		500	500	500	500	500	515	515	1029	500,00	500	97,09%	97,09%	48,59%
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN</b>																	
<b>III Mewujudkan suasana nyaman atas pemenuhan kebutuhan Dasa Masyarakat</b>																	
<b>III.1 Terwujudnya kawasan Perumahan permukiman yang sehat dan layak huni</b>																	
1	Prosentase Pemenuhan air minum	-	%	-	85	85	90	95	100	75,98	75,98	82,56	95	100	89,39%	89,39%	91,73%

## RENSTRA 2023-2026

Dinas

2	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan Prasarana dan sarana distribusi air minum		KK		821	821	821	821	821	32159	32159	115694	821	821	3917%	3917%	14092%
3	Jumlah penerima penyediaan prsarana dan sarana air minum		KK		250	250	250	250	250	313	313	584	250	821	125,20%	125,20%	233,60%
4	Presentase cakupan sanitasi dasar		%		60	60	70	80	90	60	60	70	80	90	100,00%	100,00%	100,00%
5	Jumlah penerima penyediaan prsarana dan sarana air limbah		KK		150	150	150	150	150	26769	26769	27927	150	821	17846,00%	17846,00%	18618,00%
6	Jumlah kegiatan pengendalian/penunjang pengelolaan air minum dan air limbah yang dilaksanakan		Keg		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Luas kawasan lingkungan Permukiman penduduk perdesaan yang layak		Ha		877	877	928	945	970	0	0	2	945	970	0,00%	0,00%	0,22%
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>																	
<b>III</b>	<b>Mewujudkan suasana nyaman atas pemenuhan kebutuhan Dasa Masyarakat</b>																
<b>III.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas Infrastruktur dasar keterpaduan tata ruang wilayah.</b>																
1	Jumlah operasi pengendalian angkutan umum di jalan raya	-	Kali	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%
2	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor		Unit		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
3	Jumlah terminal angkutan sunagi danau dan penyebarangan		Unit		4	4	5	6	7	6	6	0	6	7	150,00%	150,00%	0,00%
4	Jumlah penyusunan Norma kebijakan standar dan Prosedur bidang perhubungan		Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%



# RENSTRA 2023-2026

Dinas

5	Jumlah Halte bus,gedung terminal yang dibangun		KK		10	10	10	10	10	0	0	3	10	10	0,00%	0,00%	30,00%
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>																	
<b>III Meningkatkan suasana kedamaian dan aspek keadilan pelayanan Pemerintahan</b>																	
<b>III.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih di sertai dengan penerapan e geverment</b>																	
1	Jumlah aset tanah yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah	-	Ha	-	10	10	10	10	10	11,7	11,7	6,12	10	19	117,00%	117,00%	61,20%
2	Jumlah aparatur yang mengikuti penyuluhan hukum		Aparatur		50	50	50	50	50	75	75	125	50	50	150%	150%	250%
3	Jumlah persil tanah milik Pemerintah Daerah yang telah berertifikasi		Persil		189	189	216	243	270	30	31	15	243	270	15,87%	16,40%	6,94%
4	Jumlah minimal masalah dan sengketa pertanahan di Kabupaten Boalemo yang ditangani		Sengketa		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100,00%	100,00%	100,00%
5	Jumlah aset tanah pemerintah daerah yang terpetakan		Data/Aplikai		10	10	10	10	10	0	0	0	1	1	0,00%	0,00%	0,00%



### 2.2.1 Kondisi Perumahan dan Permukiman

Kondisi permukiman di Kabupaten Boalemo pada saat ini masih ditandai dengan rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dan menurunnya kualitas lingkungan permukiman. Sampai dengan saat ini rumah yang layak huni di Kabupaten Boalemo sebesar 73,72% atau 30.881 rumah dari jumlah rumah sebanyak 22.661 unit. Sedangkan kondisi rumah yang tidak layak huni sebanyak 11.005 unit atau 26,27% Tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak dan terjangkau masih belum dapat diimbangi dengan kemampuan penyediaan perumahan baik oleh masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah.

### 2.2.2 Kondisi Lingkungan Permukiman

Kondisi lingkungan permukiman di Kabupaten Boalemo secara umum masih bersifat permukiman yang tumbuh alami, bahkan di beberapa kawasan padat permukiman kumuh nelayan terdapat titik-titik genangan dan rawan banjir akibat sistem drainase yang masih buruk. Dalam hal pemenuhan sanitasi dasar, pada tahun 2022 cakupan sanitasi di Kabupaten Boalemo mencapai 79 %. Dimana jumlah rumah tinggal yang bersanitasi sebanyak 1433 KK dengan jumlah rumah di Kabupaten Boalemo 22.661 unit.

Dalam hal pemenuhan sanitasi dasar, kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2017 secara rinci dapat dilihat pada Tabel sbb :





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

**Tabel 2.6**  
**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Per Kecamatan di**  
**Kabupaten Boalemo Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah rumah tinggal	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1.	Kecamatan Tilamuta	3.454	3577	104%
2.	Kecamatan Botumoito	2.747	1534	56%
3.	Kecamatan Mananggu	1.731	1058	61%
4.	Kecamatan Dulupi	2.891	1139	39%
5.	Kecamatan Paguyaman	5.884	2670	45%
6.	Kecamatan Wonosari	4.622	3257	70%
7.	Kecamatan Paguyaman Pantai	1.332	433	33%
	Jumlah	22.661	13.668	38.86%

Sumber : Dinas Perkimhubtan Kab. Boalemo Tahun 2022

**Tabel 2.7**  
**Kondisi Bidang Perumahan dan Permukiman**  
**Di Kabupaten Boalemo Tahun 2022**

No	Uraian	Kecamatan							Total
		Tilamuta	Dulupi	Mananggu	Pag. Pantai	Paguyaman	Botumoito	Wonosari	
1	Jumlah Rumah Tangga memiliki Sanitasi	3577	1139	1058	433	2670	1534	3257	13.668,00 Kk
2	Luas Wilayah Kawasan Kumuh	65607,405	8730	188311,9	0	4851	277119,5	20805,4	565.425,21 m2
3	Jumlah RT Pengguna Air Bersih	5314	2266	2911	1323	5811	3445	2509	23.579,00 Kk
4	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	120.795	0	36012,22	33.600	0	24049,2	34027,6	248.484,11 m2
5	Jumlah Rumah	3.454	2.891	1.731	1.332	5.884	2.747	4.622	22.661,00 Unit
6	Jumlah Rumah Layak Huni	2.234	2197	1509	1.163	4947	2024	3152	17.226,00 Unit
7	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	1220	694	222	169	937	723	1470	5.435,00 Unit
8	Jenis Sanitasi yang ada di desa :								
	- MCK	299	107	358	55	259	121	589	1.788,00 Unit





## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

	- Jamban	3154	785	742	570	2432	950	3310	11.943,00	Bh
9	Jenis Sumber Air bersih yang ada di desa :									
	- Sumur	1740	1486	1030	96	1682	767	3579	10.380,00	Bh
	- PDAM	1652	119	60	192	252	301	175	2.751,00	Ttk
	- Hidran Umum	29	28	19	30	46	169	29	350,00	Unit
	- SPAM	19	9	8	332	7	280	8	663,00	Unit
10	Jenis Pengelolaan Sampah yang ada di desa									
	- TPS	9	657	2	14	402	5	13	1.102,00	Bh
11	Panjang Drainase	18390	4820	10932	6658	9435	10688	7995	68.918,00	M
12	Panjang Jalan Lingkungan yang ada di desa	611179	32520	43.550	26.500	2.940	40.774	43.450	800.913,00	M

Sumber : Dinas Perkimhubtan Kab. Boalemo tahun 2022

### 2.2.3 Kondisi Pelayanan Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Perhubungan digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan, Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo, adapun standar dan kebutuhan pelayanan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :





## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

### 1. Perhubungan Darat

- Pelayanan Pengujian kendaraan Bermotor JBB 0 Kg s/d 9.000 Kg, waktu pengurusan pelayanan maksimal 30 Menit dan kebutuhan aparatur pelaksana 6 orang
- Pelayanan Retribusi terminal dan jasa transportasi waktu pengurusan pelayanan setiap hari aparatur pelaksana 3 orang
- Pelayanan Retribusi parker ditepi jalan waktu pengurusan pelayanan setiap hari, aparatur 34 orang

### Bidang Perhubungan Laut

- Pelayanan pengendalian dan pengawasan jaringan transportasi laut waktu pengurusan pelayanan setiap hari, aparatur pelaksana 3 orang.

Kondisi transportasi di Kabupaten Boalemo secara umum masih kurang baik hal ini disebabkan berbagai faktor, antara lain kondisi lalu lintas darat. Dari tahun 2016 s.d 2018, tercatat sudah 522 kasus kecelakaan lalu lintas, dimana tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.8 Jumlah Kecelakaan dan Korban Lalu Lintas  
Di Kabupaten Boalemo Tahun 2016 s.d 2018**

Tahun	Jumlah Kecelakaan	Korban			Jumlah
		Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	
1	2	3	4	5	5
2016	82	15	21	83	<b>201</b>
2017	65	8	12	93	<b>178</b>
2018	50	7	15	19	<b>143</b>
<b>Total</b>	<b>197</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>195</b>	<b>522</b>

Sumber : Kab. Boalemo Dalam Angka 2022

**Tabel 2.9 Banyaknya Kendaraan Bermotor**





## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

### Di Kabupaten Boalemo Tahun 2016 s.d 2021

No.	Jenis Kenderan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Kenderaan roda 4	-	-	-	-	-	-
	Station wagon	-	-	-	-	-	-
	Jeep	-	-	-	-	-	-
	Sedan	-	-	-	-	-	-
	Mikrolet	123	114	115	120	-	162
2	Angkutan	-	-	-	-	-	-
	Truk barang	201	226	243	262	-	423
	Truk tangki	5	5	5	5	-	-
	Truk pemadaman	-	-	-	-	-	-
	Pick up	1055	1188	961	1037	1037	1037
	Ambulance	25	24	24	24	24	24
3	Bus	16	16	16	16	-	-
	Bus panjang	2	1	1	1	1	1
	Mini bus	5	5	5	5	5	14
4	Kenderaan roda 2	-	-	-	-	-	-
	Sepeda kumbang	-	-	-	-	-	-
	Scooter	-	-	-	-	-	-
5	Kenderaan roda 3	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1482</b>	<b>1656</b>	<b>1910</b>	<b>2115</b>	<b>-</b>	<b>3375</b>

Pencapaian kinerja pelayanan di bidang perhubungan di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.10 Kinerja Pelayanan Bidang Perhubungan**





## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

### Kabupaten Boalemo Tahun 2022

NO.	URAIAN	CAPAIAN
1	2	3
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%
2	Prosentase angkutan umum yang laik jalan	100%
3	Jumlah prasarana fasilitas perhubungan	3 Unit
4	Jumlah aparatur yang berkompeten dalam bidang lalu lintas jalan	3 Orang
5	Jumlah terminal (di Kec. Tilamuta, dan Kec. Mananggu)	3 Unit
6	Jumlah halte bus dalam pelayanan arus keberangkatan dan kedatangan di Kec. Wonosari	7 Unit
7	Gedung Uji Kendaraan Bermotor	1 Unit
8	Peralatan dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor	8 Unit

Pada tahun 2021 jumlah angkutan umum yang layak jalan meningkat sejumlah 1281 unit dari tahun 2017 sebanyak 1656 unit. Sebuah kendaraan atau angkutan umum dianggap laik jalan apabila memenuhi persyaratan teknis yang dibuktikan dengan adanya buku KIR (Pemeriksaan Laik Jalan), izin trayek, Surat Kendaraan Untuk Angkutan Barang (SKUAB), Surat Kendaraan Untuk Angkutan (SKUA) serta perlengkapan kendaraan lainnya. Berikut perkembangan jumlah angkutan umum yang laik jalan selang tahun 2017 s.d 2021.

**Tabel 2.11.**

**Jumlah Angkutan Umum Yang Laik Jalan Di Kabupaten Boalemo  
Tahun 2017 s.d 2021**

No.	Uraian	Tahun (Unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angkutan Umum yang laik jalan	1656	1910	2115	-	1281





## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

Disamping itu, melalui kegiatan operasi terpadu antara pihak Kepolisian RI dalam hal ini Polres Boalemo bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan khususnya Bidang Perhubungan, pelanggaran angkutan umum setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini dibuktikan dengan kelengkapan surat-surat kendaraan serta berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas. Kedudukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan dalam kegiatan ini hanya sebatas pada pemeriksaan surat-surat kendaraan/angkutan umum terkait kelayakan jalan yaitu izin trayek, KIR, SKUAB dan SKUA. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap pelangar lalu lintas. Kewenangan tersebut terdapat pada pihak Kepolisian RI lebih khusus lagi Polres Boalemo.

Sementara itu, jumlah halte bus di Kabupaten Boalemo sebanyak 2 (dua) unit yang terletak di Kecamatan Wonosari. Sedangkan terminal Type B di Kec. Tilamuta. Untuk rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan di Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel 2.12. berikut.

**Tabel 2.12.**  
**Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang Terpasang Di Kabupaten Boalemo Tahun 2021**

No.	Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Kelegkapan LLAJ	Jumlah
1	2	3
1.	Papan pengaman jalan (Guadrill)	120 meter
2.	Isyarat (Delineator)	160 Unit
3.	Warning light	8 unit
4.	Traffic light	3 unit
5.	Rambu jalan	50 unit





## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

6.	Media sosialisasi keselamatan transportasi darat	-
----	--	---

Untuk bidang perhubungan laut, belum dapat bekerja maksimal disebabkan sumber daya manusia dan sarana prasarana fasilitas di bidang perhubungan laut yang masih kurang. Disamping itu juga adanya kewenangan perhubungan laut yang belum memiliki payung hukum yang jelas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sehingga jangkauan atau ruang lingkup kewenangan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan di bidang perhubungan laut terbatas. Sampai dengan tahun 2017, Kabupaten Boalemo memiliki satu dermaga atau pelabuhan barang yang terletak di Kecamatan Tilamuta. Dermaga ini menghubungkan jalur pelayaran teluk tomini dan perairan sekitarnya antara lain dengan Sulawesi Tengah dan Bitung. Aktifitas bongkar muat di pelabuhan ini masih belum banyak disebabkan masih kurangnya kapal barang yang melakukan aktifitas bongkar muat dan masih terbatas pada bongkar muat semen dan kopra. Selain pelabuhan, terdapat pula dermaga mini atau tambatan perahu yang tersebar di beberapa Kecamatan. Sampai dengan tahun 2017, jumlah tambatan perahu yang telah dibangun sebanyak 7 unit yang berada di Kecamatan Dulupi, Manangu dan Botumoito.

### 2.2.4 Kondisi Pelayanan Bidang Pertanahan

Pembangunan di bidang pertanahan merupakan pembangunan yang dilaksanakan terus menerus dan berkelanjutan dan saling menjadi dampak antara periode tertentu terhadap periode waktu berikutnya.

Pembangunan di bidang pertanahan khususnya menyangkut tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo adalah terkait





## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

inventarisasi, pengelolaan dan legalitas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo serta penyelesaian konflik pertanahan. Pada tahun 2016, tanah pemerintah daerah yang telah diinventarisasi/dilegalisasi sebanyak 770 persil. Sehingga masih ada tanah pemerintah daerah Kabupaten Boalemo yang belum diinventarisasi/dilegalisasi sebanyak 739 persil. Selanjutnya di Tahun 2021 pemerintah daerah yang telah diinventarisasi /dilegalisasi 59 Persil dari 611 Persil.

### 2.2.5 Kondisi Kinerja Keuangan

Kondisi kinerja keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo yang dapat disajikan adalah di tahun 2018 hingga tahun 2022. Rasio capaian anggaran keuangan dari semua program dapat dikatakan baik atau efisien. Hal ini dikarenakan persentase capaian kinerja program (100%) melebihi rata-rata persentase penyerapan anggaran (<100%). Semua program dan kegiatan yang ada pada indikator kinerja terlaksana dengan capaian sesuai target, ada 2 faktor yang menyebabkan capaian anggaran kurang dari 100%, yaitu:

1. Efisiensi anggaran belanja langsung pada barang dan jasa;
2. Efisiensi belanja kontrak hasil negosiasi pembelanjaan. Kedua hal tersebut merupakan hal yang bersifat non teknis, sehingga tidak mengganggu kinerja program dan kegiatan. Berikut kondisi kinerja keuangan dapat disajikan dalam tabel berikut ini





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

## Tabel T-C.24.

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

KOD E	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	
	URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH																	
I	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Prumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan Kab. Boalemo.																	
I.1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Dinas Prumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Pertanahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik																	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.080.61 5.347,00	7.612.57 3.423,00	5.812.59 7.152,00	5.026.15 5.815,00	5.835.05 0.082,00	6.575.09 9.405,00	7.155.94 6.315,00	5.755.91 7.008,00	5.177.15 9.121,00	2.287.6 07.530, 00	92, 86 %	94, 00 %	99, 02 %	103 ,00 %	39, 20 %	6.273.39 8.363,80	5.390.34 5.875,80

# RENSTRA 2023-2026

Dinas

2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.650.633.347,00	5.632.538.323,00	4.650.035.152,00	5.026.155.815,00	5.835.050.082,00	5.187.031.467,00	5.351.373.310,00	4.629.716.796,00	4.958.822.035,00	2.016.534.530,00	91,80%	95,01%	99,56%	98,66%	34,56%	5.358.882.543,80	20.530.250.514,00
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	716.904.000,00	624.775.000,00	375.043.000,00	-	-	716.815.676,00	624.961.062,00	366.076.489,00	218.337.086,00	271.073.000,00	99,99%	100,03%	97,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	343.344.400,00	1.980.404.913,00
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713.078.000,00	1.355.260.100,00	787.519.000,00	-	-	671.252.262,00	1.179.611.943,00	760.123.723,00	-	-	94,13%	87,04%	96,52%	#DIV/0!	#DIV/0!	571.171.420,00	2.610.987.928,00
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# RENSTRA 2023-2026

Dinas

URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG OPD																		
II Mewujudkan suasana kenyamanan atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat																		
II.1 Terwujudnya kawasan perumahan permukiman yang sehat dan layak huni																		
2.14.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	6.885.899.000,00	6.153.380.000,00	7.364.759.000,00	-	127.060.000,00	6.750.859.156,00	6.104.878.170,00	6.882.334.200,00	-	63.996.260,00	98,04%	99,21%	93,45%	#DI V/0 !	50,37%	4.106.219.600,00	19.750.870.778,00
01.01.15.07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	6.607.299.000,00	5.681.080.000,00	6.757.000.000,00	-	-	6.474.584.500,00	5.663.192.964,00	6.276.600.000,00	-	-	97,99%	99,69%	92,89%	#DI V/0 !	#D IV/0!	3.809.075.800,00	18.414.377.464,00
01.01.15.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	278.600.000,00	472.300.000,00	240.209.000,00	-	-	276.274.656,00	441.685.206,00	238.200.000,00	-	-							
01.01.15.11	Penyusunan Rencana Tata bangunan dan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	-	-	367.550.000,00	-	-	-	-	367.534.200,00	-	-							
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	-	127.060.000,00	-	-	-	-	63.996.260,00	#D IV/0!	#DI V/0 !	#D IV/0!	#DI V/0 !	50,37%	25.412.000,00	12.799.252,00
II.2 Mewujudkan suasana kenyamanan atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat																		
II.1 Terwujudnya kawasan perumahan permukiman yang sehat dan layak huni																		



# RENSTRA 2023-2026

Dinas

01.0 1.21	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	7.785.98 8.000,00	10.755.8 28.079,00	9.203.67 7.015,00	-	-	6.720.11 4.184,00	9.649.64 8.366,73	8.853.35 8.812,00	-	-	86, 31 %	89, 72 %	96, 19 %	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	5.226.35 0.834,60	23.749.4 16.995,73
01.0 1.21. 01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Redah	6.629.88 8.000,00	6.477.72 5.980,00	3.426.17 2.763,00	-	-	5.622.49 6.849,00	5.520.13 2.899,73	3.110.13 0.890,00	-	-	84, 81 %	85, 22 %	90, 78 %	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	3.306.75 7.348,60	14.252.7 60.638,73
01.0 1.21. 02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	860.000. 000,00	3.153.76 0.000,00	5.418.50 0.000,00	-	-	830.220. 000,00	3.094.80 6.700,00	5.417.00 5.122,00	-	-	96, 54 %	98, 13 %	99, 97 %	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	1.886.45 2.000,00	9.342.03 1.822,00
01.0 1.21. 04	Fasilitasi pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah	22.500.0 00,00	220.000. 000,00	-	-	-	17.420.0 00,00	210.599. 904,00	-	-	-							
01.0 1.21. 09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	240.100. 000,00	829.097. 696,00	302.041. 225,00	-	-	218.266. 800,00	758.039. 863,00	269.377. 800,00	-	-							
01.0 1.21. 10	Fasilitasi pembinaan teknik Pengelolaan Air Minum	33.500.0 00,00	75.244.4 03,00	-	-	-	31.710.5 35,00	66.069.0 00,00	-	-	-	94, 66 %	87, 81 %	#D IV/ 0!	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	21.748.8 80,60	97.779.5 35,00
01.0 1.21. 11	Rehabilitasi/peeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	-	-	56.963.0 27,00	-	-	-	-	56.845.0 00,00	-	-	#D IV/ 0!	#DI V/0 !	99, 79 %	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	11.392.6 05,40	56.845.0 00,00
<b>II</b>	<b>Mewujudkan suasana kenyamanan atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat</b>																	



# RENSTRA 2023-2026

Dinas

<b>II.1 Terwujudnya kawasan perumahan permukiman yang sehat dan layak huni</b>																		
2.14.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	1.220.70 4.200,00	300.000. 000,00	-	-	-	1.100.92 6.429,00	10.300. 000,00	#D IV/ 0!	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	90, 19 %	3,4 3%	304.140. 840,00	1.102.98 6.429,00
2.14.03.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	-	-	1.220.70 4.200,00	300.000. 000,00				1.100.92 6.429,00	10.300. 000,00				90, 19 %	3,4 3%	304.140. 840,00	1.102.98 6.429,00
		-	-	-	-	-									#DI V/0 !	#D IV/ 0!	-	-
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																		
<b>II Mewujudkan suasana kenyamanan atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat</b>																		
<b>II.1 Terwujudnya kawasan perumahan permukiman yang sehat dan layak huni</b>																		
2.14.04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	-	29.907.7 52.996,0 0	18.177.5 48.885,0 0	-	-	-	23.928.9 41.030,0 0	208.104 .800,00	#D IV/ 0!	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	80, 01 %	1,1 4%	9.617.06 0.376,20	23.970.5 61.990,0 0
2.14.04.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	-	29.907.7 52.996,0 0	18.177.5 48.885,0 0	-	-	-	23.928.9 41.030,0 0	208.104 .800,00	#D IV/ 0!	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	80, 01 %	1,1 4%	9.617.06 0.376,20	23.970.5 61.990,0 0
<b>Meningkatkan layanan Pemerintahan yang good governance</b>																		
<b>Meningkatnya tata kelola dan pelayanan pertanahan</b>																		



# RENSTRA 2023-2026

Dinas

01.0 1.16	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,P EMILIKAN,PENG GUNA DAN PEMANFAATAN TANAH	390.000. 000,00	2.392.40 0.000,00	2.269.77 8.500,00	-	-	140.340. 906,00	1.863.16 7.350,00	2.216.97 2.040,00	-	-	35, 98 %	77, 88 %	97, 67 %	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	1.010.43 5.700,00	4.220.48 0.296,00
01.0 1.16. 01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pegguna dan Pemanfaatan Tanah	-	2.100.00 0.000,00	2.029.69 8.500,00	-	-	-	1.623.75 4.000,00	2.010.82 5.000,00	-	-	#D IV/ 0!	77, 32 %	99, 07 %	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	825.939. 700,00	3.634.57 9.000,00
1.16. 02	Penyuluhan Hukum Pertanahan	-	-	86.580.0 00,00	-	-	-	-	71.789.9 00,00	-	-							
01.0 1.16. 03	Legalitas Arsip Pengadaan Tanah pemerintah daerah	390.000. 000,00	292.400. 000,00	153.500. 000,00	-	-	140.340. 906,00	239.413. 350,00	134.357. 140,00	-	-	35, 98 %	81, 88 %	87, 53 %	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	167.180. 000,00	514.111. 396,00
0101 .17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK- KONFLIK PERTANAHAN	270.400. 000,00	293.000. 000,00	63.950.0 00,00	-	-	268.390. 024,00	283.993. 850,00	53.735.0 00,00	-	-	99, 26 %	96, 93 %	84, 03 %	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	125.470. 000,00	606.118. 874,00
01.0 1,17. 01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	270.400. 000,00	293.000. 000,00	63.950.0 00,00	-	-	268.390. 024,00	283.993. 850,00	53.735.0 00,00	-	-	99, 26 %	96, 93 %	84, 03 %	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	125.470. 000,00	606.118. 874,00
2.10. 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	-	-	708.700. 000,00	-	-	-	-	-	#D IV/ 0!	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	#DI V/0 !	0,5 5%	141.740. 000,00	780.000, 00



# RENSTRA 2023-2026

Dinas

2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	708.700.000,00	-	-	-	-	3.900.000,00	#D IV/0!	#DI V/0!	#D IV/0!	#DI V/0!	0,55%	141.740.000,00	780.000,00
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	-	1.397.294.536,00	-	-	-	-	1.392.051.850,00	-	#D IV/0!	#DI V/0!	#D IV/0!	99,62%	#D IV/0!	279.458.907,20	1.392.051.850,00
2.10.05.2.01	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.397.294.536,00	-	-	-	-	1.392.051.850,00	-	#D IV/0!	#DI V/0!	#D IV/0!	99,62%	#D IV/0!	279.458.907,20	1.392.051.850,00
01.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	-	-	15.159.940,00	-	-	-	-	15.149.940,00	-	-	#D IV/0!	#DI V/0!	99,93%	#DI V/0!	#D IV/0!	3.031.988,00	15.149.940,00
01.01.18.01	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	-	-	15.159.940,00	-	-	-	-	15.149.940,00	-	-	#D IV/0!	#DI V/0!	99,93%	#DI V/0!	#D IV/0!	3.031.988,00	15.149.940,00
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	-	-	-	-	90.000.035,00	-	-	-	-	48.297.000,00	#D IV/0!	#DI V/0!	#D IV/0!	#DI V/0!	53,66%	18.000.007,00	9.659.400,00



## RENSTRA 2023-2026

Dinas

2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	-	-	-	-	90.000.035,00	-	-	-	-	48.297.000,00	#D IV/0!	#DI V/0!	#D IV/0!	#DI V/0!	53,66%	18.000.007,00	9.659.400,00
01.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	-	-	391.253.490,00	-	-	-	-	372.519.490,00	-	-	#D IV/0!	#DI V/0!	95,21%	#DI V/0!	#D IV/0!	78.250.698,00	372.519.490,00
1.15.02	Penyusunan kebijakan, Norma Standar dan prosedur Bidang perhubungan	-	-	391.253.490,00	-	-	-	-	372.519.490,00	-	-	#D IV/0!	#DI V/0!	95,21%	#DI V/0!	#D IV/0!	78.250.698,00	372.519.490,00
01.01.15.06	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	909.175.000,00	7.804.000.000,00	931.331.117,00	-	-	904.965.884,00	6.638.360.052,00	931.325.117,00	-	-							
01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1.216.050.000,00	4.267.165.000,00	-	-	-	512.405.748,00	3.567.582.706,00	-	-	-	42,14%	83,61%	#D IV/0!	#DI V/0!	#D IV/0!	1.096.643.000,00	4.079.988.454,00
01.01.17.05	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dijalan Raya	1.182.250.000,00	4.267.165.000,00	-	-	-	512.405.748,00	3.567.582.706,00	-	-	-							
01.01.17.15	Pemilihan dan Pemberian penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan	33.800.000,00	-	-	-	-	32.349.270,00	-	-	-	-							

# RENSTRA 2023-2026

Dinas

	Angkutan Umum Teladan																	
1.18.	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	-	-	185.500. 000,00	-	-	-	-	185.235. 500,00	-	-	#D IV/ 0!	#DI V/0 !	99, 86 %	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	37.100.0 00,00	185.235. 500,00
1.18. 02	Pembangunan Halte Bus, taxi gedung terminal	-	-	185.500. 000,00	-	-	-	-	185.235. 500,00	-	-	#D IV/ 0!	#DI V/0 !	99, 86 %	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	37.100.0 00,00	185.235. 500,00
2.15. 02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	-	364.040. 350,00	-	-	-	-	356.837. 600,00	-	#D IV/ 0!	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	98, 02 %	#D IV/ 0!	72.808.0 70,00	356.837. 600,00
2.15. 02.2. 01	Penetapan rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	-	364.040. 350,00	-	-	-	-	356.837. 600,00	-	#D IV/ 0!	#DI V/0 !	#D IV/ 0!	98, 02 %	#D IV/ 0!	72.808.0 70,00	356.837. 600,00
2.15. 02.2. 09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.250.00 0.000,00	-	-	-	-	1.808.90 3.040,00	-							
2.15. 02.2. 02	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	42.500.0 00,00	-	-	-	-	-							
2.15. 02.2. 05	Pengujian Berkala	-	-	-	-	161.265. 980,00	-	-	-	-	112.855 .000,00							



## RENSTRA 2023-2026

Dinas

	Kendaraan Bermotor																	
01.0 1.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	-	599.250.000,00	-	-	-	-	597.360.000,00	-	-	-	#D IV/0!	99,68%	#D IV/0!	#DI V/0!	#D IV/0!	119.850.000,00	597.360.000,00
01.0 1.16. 09	Penyediaan Jalan dan Drainase lingkungan	-	599.250.000,00	-	-	-	-	597.360.000,00	-	-	-	#D IV/0!	99,68%	#D IV/0!	#DI V/0!	#D IV/0!	119.850.000,00	597.360.000,00
1.16. 10	Penyediaan Jalan dan Drainase lingkungan Terutama di Pemukiman masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	-	1.441.000.000,00	-	-	-	-	1.439.340.000,00	-	-							
01.0 1.24	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA	-	287.000.000,00	254.500.000,00	-	-	-	286.790.000,00	249.590.000,00	-	-	#D IV/0!	99,93%	98,07%	#DI V/0!	#D IV/0!	108.300.000,00	536.380.000,00
01.0 1.24. 01	Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan	-	287.000.000,00	254.500.000,00	-	-	-	286.790.000,00	249.590.000,00	-	-	#D IV/0!	99,93%	98,07%	#DI V/0!	#D IV/0!	108.300.000,00	536.380.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.412.902.347,00</b>	<b>27.207.181.502,00</b>	<b>24.729.921.607,00</b>	<b>37.551.907.547,00</b>	<b>25.148.358.967,00</b>	<b>20.454.803.675,00</b>	<b>25.057.634.051,73</b>	<b>23.777.467.000,00</b>	<b>31.599.078.430,00</b>	<b>2.573.908.590,00</b>	<b>91,26%</b>	<b>92,10%</b>	<b>96,15%</b>	<b>84,15%</b>	<b>10,23%</b>	<b>116.931.584.796,40</b>	<b>101.403.764.874,73</b>



## 2.3 Tantangan dan Peluang Organisasi Perangkat Daerah

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Boalemo yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang perumahan, permukiman, transportasi dan pertanahan maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan baik di bidang perumahan, permukiman, transportasi dan pertanahan untuk lebih baik bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo maupun bagi stakeholder lainnya.

Adapun yang menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo sebagai berikut.

### 2.3.1 Tantangan

1. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan bangunan dalam pengurangan resiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh
2. Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di dekat tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di hunian tidak layak, dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh.
3. Belum terintegrasinya perencanaan baik antara masing-masing rencana sektoral antara rencana sektoral dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang
4. Perlu sinkronisasi perencanaan dan implementasi mengingat banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota
5. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat



- setiap tahunnya menyebabkan tekanan terhadap pemenuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, limbah, dan permukiman kumuh)
6. Kecenderungan peningkatan kebutuhan penyediaan rumah layak huni di perkotaan yang semakin tinggi seiring semakin dominannya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan
  7. Urban sprawl karena pembangunan rumah yang cenderung menyebar ke kawasan peri urban/pedesaan
  8. Terdapatnya regulasi terkait penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan lengkap
  9. Belum adanya kebijakan terkait rumah yang ditempati oleh lebih dari 1 (satu) keluarga secara bersama untuk efisiensi pemanfaatan lahan
  10. Kurang optimalnya SDM pelaksana dari segi kualitas dan kuantitas;
  11. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengujian kendaraan bermotor, perijinan angkutan, dan ketertiban lalu lintas serta Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
  12. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat bidang lalu lintas dan angkutan jalan
  13. Masih banyaknya tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo yang belum bersertifikat.

### 2.3.2 Peluang

Untuk menjawab tantangan yang dihadapi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo perlu memanfaatkan peluang sebagai berikut:

1. Adanya keterpaduan pengembangan permukiman dengan sektor lain untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan





## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

- 2 Tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan
- 3 Semakin kritis dan proaktif-nya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah
- 4 Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- 5 Meningkatkan pelayanan public yang berorientasi pada ketepatan, kecepatan dan kepuasan masyarakat dengan pelayanan berbasis Information Technology (IT) di bidang permukiman perumahan, Perhubungan dan pertanahan.
- 6 Meningkatkan kerjasama dengan stackeholder yang berkesinambungan
- 7 Meningkatkan pembinaan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan





## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah**

Sektor perumahan, pemukiman, perhubungan dan pertanahan menjadi sangat vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal-hal terkait perumahan, pemukiman, perhubungan maupun pertanahan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kondisi perekonomian masyarakat baik perkotaan maupun desa.

Adapun permasalahan perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan dan pertanahan secara umum di Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut.

##### *3.1.1. Permasalahan Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan*

1. Rumah masyarakat umum yang terkena bencana alam rumah bagi korban bencana;
2. Masih tingginya kawasan pemukiman masih yang dibawah standar layak huni
3. Penyediaan gedung kantor pemerintah yang belum memadai;
4. Masih banyaknya rumah tidak layak huni dan pemukiman kumuh;
5. Terbatasnya ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitasi lingkungan perumahan yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

##### *3.1.2. Permasalahan Bidang Permukiman*

1. Tidak adanya regulasi tentang yang mengatur Permukiman dan Kawasan Kumuh ;



2. Belum adanya dokumen pendukung tentang penanganan kawasan permukiman
3. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
4. Belum optimalnya prasarana dan sarana dasar masyarakat miskin di perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah;
5. Kurangnya rumah layak huni yang ditempati oleh masyarakat
6. Masih tingginya kawasan pemukiman yang dibawah standar layak huni

### 3.1.3. Permasalahan Bidang Perhubungan

Permasalahan di bidang perhubungan, mencakup beberapa aspek baik aspek Sumber Daya Manusia, aspek sarana prasarana dan teknologi maupun aspek kelembagaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Aspek Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan, masih rendahnya kompetensi di bidang perhubungan yang disebabkan beberapa faktor, yaitu :
  - a. Kurangnya sumber daya manusia bidang perhubungan darat yang memiliki latar belakang pendidikan formal transportasi darat;
  - b. Terbatasnya sumber daya manusia bidang perhubungan laut yang memiliki keahlian/kualifikasi terkait dengan pelayaran dan pengelolaan pelabuhan.
2. Belum optimalnya layanan Lalu lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ ), yaitu :
  - a. bertambahnya jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pembangunan / pelebaran
  - b. Rendahnya prosentase kendaraan angkutan penumpang umum yang melakukan uji berkala dibandingkan data jumlah angkutan umum umum dan barang yang ada saat ini.
  - c. Belum semua lokasi di wilayah Kabupaten yang terpasang dengan sarana keselamatan lalu lintas dan banyaknya





- sarana dan prasarana jalan yang terpasang tidak berfungsi dengan baik (rusak)'
- d. Minimya ketersediaan fasilitas Prasarana yang mendukung bagi pengoperasian angkutan umum seperti adanya Simpul (Terminal/Halte) dalam Daerah sehingga belum dapat dilakukan pemetaan Jaringan Trayek dalam daerah
3. Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- a. Belum memadainya fasilitas pendukung dalam menunjang kegiatan operasional dan pengelolaan pelabuhan laut.
  - b. Rendah Persentase kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Kurangnya Konsultasi dan Koordinasi pada pengusaha local
  - d. Kurangnya Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Aspek kelembagaan, yaitu :
- a. Belum sinerginya koordinasi antar daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan kewenangan;
  - b. Masih adanya kewenangan bidang perhubungan laut yang belum dapat dilaksanakan karena belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

#### 3.1.4. Permasalahan Bidang Pertanahan

Adapun permasalahan di bidang pertanahan, adalah :

- a. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang pertanahan yang masih perlu ditingkatkan terutama tenaga lapangan dan administrasi pertanahan;
- b. Masih adanya tanah milik Pemerintah Daerah yang belum tercatat dan terinventarisir dengan baik;





## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

- c. Masih adanya tanah Pemerintah Daerah tidak memiliki atas hak
- d. Masih adanya tanah masyarakat yang sudah di kuasai oleh Perusahaan swasta
- e. Masih adanya tanah masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi oleh pemerintah daerah
- f. Belum tersusunya perencanaan Penggunaan tanah dan pemanfaatan Tanah pasca reklamasi

Tabel T-B. 35

**Permasalahan dan Isu - isu Strategis  
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Bencana Alam	Rumah masyarakat umum yang terkena bencana alam	Desain rumah aman dari bencana alam tidak tersedianya lahan/kawasan untuk relokasi korban bencana Banyaknya rumah yang dibangun dibawah pegunungan sehingga perlu dilakukan relokasi ketempat yang aman





## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

2	Masih tingginya kawasan pemukiman masih yang dibawah standar layak huni	-Tidak adanya Peraturan Daerah tentang Permukiman Kumuh yang mengatur Kawasan Kumuh	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup yang bersih dan sehat dibutuhkan penyusunan dokumen tentang penanganan permukiman
		Belum adanya dokumen pendukung tentang Penanganan kawasan pemukiman	belum meratanya penyediaan Prasarana dan Sarana (PSU) perumahan
		-Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)	Minimnya sarana prasarana kebutuhan penunjang, air bersih, dan sanitasi
		masih sangat di butuhnya Prasarana dan Sarana PSU pada suatu kawasan ( jalan lingkungan, drainase dan lain-lain)	permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan atau hunian
3	Masih tingginya kawasan pemukiman masih yang dibawah standar layak huni	kurangnya rumah layak huni yang di tempati oleh masyarakat	Kebutuhan rumah di akibatkan oleh pertumbuhan penduduk
			banyaknya masyarakat yang kurang mampu (MBR) sehingga perlu di berikan bantuan rumah layak huni
			minimnya anggaran untuk penunjang program perumahan
			masih tingginy angka backlog dan RTRH





## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

	Konflik Pertanahan	Sebagian Aset Pemerintah Daerah tidak memiliki atas hak	Masih ada tanah masyarakat yang sudah di kuasai oleh Perusahaan swasta
			Masih ada tanah masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi oleh pemerintah daerah
			Data base tentang aset tanah pemda belum akurat
			masih banyak aset tanah belum tercatat dalam KIB
			Status Tanah milik pemda tidak memiliki alasan hak
			Masih ada aset Tanah yang belum bersertifikat
2	Izin Membuka Tanah	Penanganan izin membuka Tanah	belum dilakanakan pentausahan Tanah
			belum tersusun data base tentang pertanahan
3	Penatagunaan Tanah	Perencanaan Penggunaan Tanah	Belum tersusun data penggunaan tanah
			Belum tersusun perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah pasca reklamasi





## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

4	Belum optimalnya layanan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	bertambahnya jumlah kendaraan tidak sebanding dengan pembangunan / pelebaran	Minimya ketersediaan fasilitas Prasarana yang mendukung bagi pengoperasian angkutan umum seperti adanya Simpul (Terminal/Halte) dalam Daerah sehingga belum dapat dilakukan pemetaan Jaringan Trayek dalam daerah
		Rendahnya prosentase kendaraan angkutan penumpang umum yang melakukan uji berkala dibandingkan data jumlah angkutan umum umum dan barang yang ada saat ini.	Kurangnya upaya penertiban dan tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam upaya menertibkan angkutan umum dan barang yang layak jalan.
5	Belum optimalnya Pengembangan Fasilitas marka jalan	Belum semua lokasi di wilayah Kabupaten yang terpasang dengan sarana keselamatan lalu lintas dan banyaknya sarana dan prasarana jalan yang terpasang tidak berfungsi dengan baik(rusak) .	kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas
			kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga kondisi sarana keselamatan lalu lintas yang telah ada



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

7	Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan	Kurangnya Personil SDM Bidang Perhubungan	Keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah Rendahnya Kualitas SDM Perhubungan
8	Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rendah Persentase kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kurangnya Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam
9	Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpang Lokal	Kurangnya Konsultasi dan Koordinasi pada pengusaha lokal	Kurangnya tersedianya Anggaran

### 3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026

Penentuan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Kebijakan Utama pembangunan daerah Kabupaten Boalemo tahun 2023-2026. Tujuan dan sasaran diformulasikan untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis. Penentuan Tujuan dan Sasaran telah mempertimbangkan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini nantinya dapat menjadi acuan untuk melihat pencapaian pada akhir masa Rencana Pembangunan Daerah.

- Peningkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian Daerah Kabupaten Boalemo sebagian besar bertumpu pada kegiatan Agribisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pengelolaan sumberdaya agribisnis yang diharapkan mampu mewujudkan peningkatan perekonomian boalemo





yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi di bidang agribisnis diharapkan PDRB dibidang agribisnis meningkat.

Selain sektor agribisnis, peningkatan ekonomi bersumber dari potensi sumberdaya alam lainnya yaitu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diharapkan mampu berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian. Pembangunan perekonomian harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang relevan.

Tujuan dari peningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat dijabarkan oleh sasaran berikut ini :

- Meningkatnya agribisnis, peran kelembagaan ekonomi masyarakat dan kualitas sumber daya produktif daerah
- Meningkatnya Status Desa dan Pemerataan wilayah
- Meningkatnya pembangunan suprastruktur, infrastruktur, dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian dan pelayanan dasar serta konektivitas Boalemo dengan daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dan di daerah teluk tomini

### **a. Sasaran Ekonomi Makro**

Kinerja keberhasilan pembangunan diukur berdasarkan sasaran indikator makro pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boalemo mulai tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan yaitu dari 6,66% pada tahun 2017 menjadi 6,7% pada tahun 2018, dan 6,7% pada tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2019 sampai dengan 2020, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan yaitu berada pada posisi -0,21%.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi makro di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB dapat memberikan gambaran tentang kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga besarnya PDRB sangat





tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah tersebut. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Perekonomian Kabupaten Boalemo pada tahun 2020 yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 5.410,9 milyar, meningkat pada tahun 2021 yang sebesar Rp. 5.491,21 milyar. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2020 besarnya mencapai Rp. 3.504,23 milyar, menurun pada tahun 2021 yang sebesar Rp. 3496.7 milyar.

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Tahun 2020, pendapatan perkapita sebesar Rp. 20.403.690,- per tahun.

Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator sasaran ekonomi makro. Semakin rendah tingkat pengangguran terbuka maka semakin tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini dapat menaikkan daya beli masyarakat sehingga mampu mendorong perputaran perekonomian di Boalemo. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan mencapai 1281 orang dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 652 orang. penambahan jumlah pengangguran terbuka ini tidak lepas dari mewabahnya pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia di awal tahun 2020 yang berdampak pada mata pencarian masyarakat.

Penduduk miskin Kabupaten Boalemo pada tahun 2021 berjumlah 31.830 orang atau 19,00 %, jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan penduduk miskin pada 2020 yang berjumlah 31.630 orang atau 18,57%. Kenaikan penduduk miskin ini tidak lepas dari pandemi Corona Disease yang melanda Indonesia yang dimulai pada tahun 2020. Imbas pandemi Corona Disease tentu memiliki dampak berantai terhadap seluruh kegiatan perekonomian masyarakat, seperti kegiatan perekonomian yang mengalami penurunan intensitas. Hal inilah yang membuat inflasi tinggi dan daya beli masyarakat menurun.





Tabel 5.3

Kesesuaian Arah Kebijakan Utama, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran pada RPD  
Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026

<b>ARAH KEBIJAKAN UTAMA</b>	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Peningkatan Perekonomian Melalui Pengembangan Agribisnis Sektoral Dan Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Agribisnis sektoral dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat	Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya agribisnis, peran kelembagaan ekonomi masyarakat dan kualitas sumber daya produktif daerah
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Pembangunan berkelanjutan di bidang Infrastruktur dan Suprastruktur yang mendukung perekonomian dan pelayanan dasar		Meningkatnya pembangunan suprastruktur, infrastruktur, dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian dan pelayanan dasar serta konektivitas Boalemo dengan daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dan di daerah teluk tomini



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Kerusakan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
--	--	---------------------------------------	--

➤ Peningkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian Daerah Kabupaten Boalemo sebagian besar bertumpu pada kegiatan Agribisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pengelolaan sumberdaya agribisnis yang diharapkan mampu mewujudkan peningkatan perekonomian boalemo yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi di bidang agribisnis diharapkan PDRB dibidang agribisnis meningkat.

Selain sektor agribisnis, peningkatan ekonomi bersumber dari potensi sumberdaya alam lainnya yaitu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diharapkan mampu berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian. Pembangunan perekonomian harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang relevan.

Tujuan dari peningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

dapat dijabarkan oleh sasaran berikut ini :

- Meningkatnya pembangunan suprastruktur, infrastruktur, dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian dan pelayanan dasar serta konektivitas Boalemo dengan daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dan di daerah teluk tomini

➤ Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Optimal

Pemerintah daerah sejatinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang mampu mengayomi masyarakat secara utuh dan menyeluruh merupakan tujuan utama pelayanan publik. Kelembagaan yang didukung oleh sistem pemerintahan yang baik mampu memberikan pelayanan yang prima, menjaga keamanan dan ketertiban,





serta perbaikan tata kelola kelembagaan. Pemerintah bersama dengan rakyat diharapkan mampu bersinergi agar dapat mewujudkan boalemo menjadi role model tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, pelayanan yang prima mampu mendapat kepercayaan rakyat sehingga menjadikan Boalemo yang amanah.

Tujuan dari terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal, Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Daerah dapat dijabarkan oleh sasaran berikut ini:

- Meningkatnya Kualitas tata kelola pelayanan publik
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi, keamanan dan ketertiban daerah.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, adalah :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Adapun sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, adalah :

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:





- (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
  - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
  - (3) Kapasitas tampung per kapita;
  - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
  3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
    - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
    - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
  4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
    - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
    - (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
  5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
    - (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
    - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

- (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
- (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
- (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
- (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

### 3.3.1.1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Visi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun 2015-2019 adalah ***“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***.

Misi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, adalah :

1. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
2. Mewujudkan Negara maritim

Tujuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, adalah :

1. Keselamatan dan keamanan transportasi;
2. Pelayanan transportasi;
3. Kapasitas Transportasi

Adapun sasaran strategis Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, adalah :

1. Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi;
2. Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi;
3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
4. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
5. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
6. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;





7. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
8. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
9. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;
10. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antar moda dan multimoda;
11. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
12. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
13. Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan;

### 3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi Gorontalo

Mengacu pada focus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 serta menelaah rumusan isu-isu strategis daerah, maka kebijakan utama pembangunan provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 adalah :

#### 1. Peningkatan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi akan dititikbertkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

#### 2. Pengembangan Wilayah dan Pedesaan

Pembangunan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh seluruh stakeholders pembangunan





pada Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.

### **3. Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Pembangunan sumberdaya manusia dititikberatkan pada Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan social, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, juga mendorong upaya Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

### **4. Peningkatan Kebudayaan dan Agama**

Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya lierasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.

### **5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis**

Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada Pembangunan infrastruktur layanan dasar, Pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

### **6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan**

Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

### **7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi.**

Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.



Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **3.3.2.1. Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo**

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, maka rumusan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

***Terwujudnya Pemenuhan akan Rumah Terjangkau dan Layak huni serta Sarana Prasarana pendukungnya, dan meningkatnya kualitas kawasan kumuh menuju Masyarakat Gorontalo yang Sejahtera.***

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan Dua **Misi** yakni :

1. Mewujudkan ketersediaan rumah hunian layak bagi masyarakat
2. Mewujudkan Permukiman Berkualitas.

### **3.3.2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo**

#### **Tujuan**

1. Penyediaan Rumah Layak Huni di Provinsi Gorontalo melalui berbagai program Nasional untuk Masyarakat Miskin dalam Bidang Perumahan
2. Penyediaan Rumah Hunian bagi korban bencana alam dan Penyediaan Rumah Hunian bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi
3. Meningkatkan Kualitas Permukiman melalui pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana utilitas Permukiman .
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat miskin melalui penyediaan Infrastruksur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
5. Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Gorontalo



6. Meningkatnya Kualitas perencanaan dan pengendalian program kegiatan serta koordinasi lintas sektor/wilayah terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman

### **Sasaran**

1. Tersedianya Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin.
2. Tersedianya Infrastruktur yang Mendukung Sarana dan Prasarana Perumahan.
3. Tersedianya infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas kawasan kumuh
4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kantor, dan peningkatan kapasitas bagi aparatur dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
5. Terselenggaranya perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta terlaksananya koordinasi dan kerjasama dilingkungan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman , lintas SKPD, Lintas Kab/kota maupun K/L.

### **Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo**

#### **Strategi**

1. Mengembangkan perencanaan yang lebih terukur dan berkualitas.
2. Menyusun Dokumen Perencanaan Khusus Penanganan Perumahan Berbasis Masyarakat & Dokumen Pencegahan & Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman di Perkotaan.
3. Mendorong terbitnya regulasi yang mendukung kegiatan Pembangunan di bidang Perumahan & Kawasan Permukiman.
4. Keterpaduan berbagai program kegiatan dalam hal peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pengentasan kawasan kumuh , sumber dana APBN maupun APBD.
5. Memperkuat koordinasi vertikal dan horisontal dalam pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Infrastruktur pendukungnya.



## Kebijakan

1. Pengembangan Perumahan dengan berdasarkan database kemiskinan dari lembaga terkait.
2. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasarana tersebut diatas..
3. Penanganan kawasan Permukiman kumuh berdasarkan SK Kumuh Kabupaten/Kota yang valid.
4. Pengelolaan keuangan yang efisiensi, transparan dan akuntabel.
5. Manajemen pengelolaan infrastruktur berbasis IT.
6. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan memperhatikan kaidah-kaidah nilai-nilai responsif gender.

### 3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

#### **Visi :**

***“Terwujudnya transportasi yang tertib, lancar dan selamat menuju masyarakat Gorontalo yang unggul, maju dan sejahtera”***

#### **Misi :**

1. Meningkatkan kapasitas dan layanan transportasi
2. Meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi

Berikut penjelasan visi dan misi sebagaimana di atas.

#### **Penjelasan Visi :**

***“Terwujudnya transportasi yang tertib, lancar dan selamat menuju masyarakat unggul, maju dan sejahtera “***



- a. **Pelayanan transportasi yang handal** diindikasikan dengan tertib, lancar, selamat dengan penjelasan sebagai berikut :
- **Tertib** diindikasikan dengan tertibnya pelaku transportasi dalam menggunakan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, udara dan kereta api
  - **Lancar** diindikasikan pada kelancaran angkutan dan penumpang di terminal, pelabuhan dan bandara serta lancarnya aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan dan bandara; adanya ketersediaan transportasi antara pemandu moda sehingga terkoneksi jaringan transportasi antara bandara, pelabuhan, dan terminal; adanya ketersediaan angkutan transportasi ke daerah terpencil.
  - **Selamat** diindikasikan dengan tersedianya fasilitas penunjang keselamatan LLAJ pada ruas jalan Provinsi yang ikut berperan dalam menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan keselamatan transportasi.

### Penjelasan Misi

#### **1. Meningkatkan kapasitas dan layanan transportasi**

Darahkan untuk meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana perhubungan.

#### **2. Meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi**

Darahkan untuk meningkatkan kapasitas keselamatan dalam pelayanan transportasi.

### Tujuan Jangka Menengah

Tujuan Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu sesuai RPJMD 2018 – 2022 adalah :





Membangun infrastruktur dasar melalui pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah :

1. Mewujudkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan
2. Meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi

## Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu sesuai RPJMD 2018 – 2022 adalah adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas daerah.
2. Meningkatnya layanan transportasi
3. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
4. Meningkatnya kapasitas keselamatan transportasi.

## Indikator Kinerja

1. Meningkatnya layanan transportasi
  - Jumlah terminal tipe B
  - Jumlah lintasan perintis
  - Prosentase pengusaha angkutan orang yang mengikuti sosialisasi
  - Jumlah frekwensi penertiban
  - Jumlah aplikasi layanan publik
  - Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kapasitas dan layanan transportasi
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi
  - jumlah laporan pengamanan dan pengaturan lalu lintas
  - Jumlah pembinaan pengaturan lalu lintas
  - jumlah peralatan operasional
  - Jumlah laporan koordinasi dan kerjasama pengembangan sarana dan prasarana perhubungan
  - Jumlah laporan hasil rapat koordinasi





- Jumlah laporan dukungan pelaksanaan EHA
- 3. Meningkatnya keselamatan transportasi
  - Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang terpasang di ruas jalan provinsi
  - Jumlah fasilitas keselamatan LLAJ yang terpelihara
  - Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi

## **Arah Kebijakan dan Strategi**

### **Arah Kebijakan**

1. Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur
2. Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
3. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan sinergitas antar stakeholder terkait
4. Meningkatkan keselamatan transportasi

### **Strategi**

1. Penyediaan jasa administrasi dan sarana prasarana perkantoran
2. Peningkatan kapasitas Aparatur
3. Peningkatan tata kelola keuangan pemerintahan
4. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan
5. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan keperintisan untuk daerah yang belum terlayani angkutan umum
6. Peningkatan pelayanan angkutan umum melalui pembinaan dan penertiban
7. Pengembangan sistem pelayanan yang efektif dan efisien
8. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi
9. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi
10. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas keselamatan transportasi





11. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha dalam peningkatan keselamatan transportasi

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang mengamanahkan bahwa perlunya penataan tata ruang yang berkualitas aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah atau Penyusunan RTRW bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasis pertanian dan perikanan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penataan ruang yang serasi, seimbang dan berkelanjutan pada gilirannya akan meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor, kualitas lingkungan hidup akan lestari.

Dalam konteks pengembangan pembangunan Daerah maka RTRW tentunya secara langsung berpengaruh terhadap implementasi kebijakan & program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan. Program dan kegiatan sepatutnya memperhatikan pola arahan pemanfaatan ruang. Pengabaian terhadap permasalahan ruang menyebabkan tidak maksimalnya penyediaan infrastruktur di Kabupaten Boalemo. Keterpaduan antar sektor layanan Penyediaan Infrastruktur memberi arah bagi percepatan pencapaian tujuan Pembangunan masa depan.

Dalam kerangka menjaga dan melestarikan pemanfaatan ruang maka terdapat isu-isu strategis pemanfaatan RTRW Kabupaten Boalemo yakni ; pola pemanfaatan ruang, pola struktur ruang serta pengembangan kawasan strategis. Dalam konteks pengembangan pembangunan Daerah maka RTRW tentunya secara langsung berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan





Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo. Program dan kegiatan sepatutnya memperhatikan pola-arahan pemanfaatan ruang. Pengabaian terhadap permasalahan ruang menyebabkan tidak maksimalnya penyediaan infrastruktur di Kabupaten Boalemo. Keterpaduan antar sektor layanan Penyediaan Infrastruktur memberikan arah bagi percepatan pencapaian tujuan Pembangunan masa depan.

### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah, telaahan RPJMD Propinsi Gorontalo, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, telaahan Renstra Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Gorontalo, pertimbangan RTRW dan KLHS, serta identifikasi internal, isu-isu strategis yang akan ditangani pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Periode 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur kebencanaan dan pasca bencana.
2. Peningkatan penyediaan infrastruktur dan prasarana sarana utilitas umum di kawasan perumahan, kawasan permukiman, kawasan kumuh, kawasan perdesaan, dan kawasan strategis dengan memperhatikan perencanaan penataan ruang dan kelestarian lingkungan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan keselamatan jalan
4. Peningkatan infrastruktur areal pelabuhan Tilamuta disesuaikan dengan Kewenangan kabupaten seperti Pemberian izin, melakukan kajian kawasan dan pengelolaan lingkungan, penataan tempat perbelanjaan untuk penumpang di area pelabuhan, dan pengelolaan lahan parkir serta unsur lainnya.
5. Peningkatan Penyelesaian sengketa tanah dan layanan perizinan membuka lahan





## **RENSTRA 2023-2026**

*Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo*

Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan yang dihasilkan, oleh karena itu penyelesaian permasalahan tersebut agar menghasilkan perencanaan pembangunan yang saling berkesinambungan

### **BAB IV**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**





## RENSTRA 2023-2026

*Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo*

### **1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama empat tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 4 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Tabel T-C.25.

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan  
Kabupaten Boalemo

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke					
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>								
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH</b>								
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo			57	60	63	66		
		1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan	1	Nilai SAKIP OPD	B	B	BB	A
		1	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat /BPK/BPKP	100	100	100	100		
		1	Persentase Barang Milik Daerah dalam	80	80	80	80		





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

	Pertanahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik.	Keadaan Baik di Lingkungan OPD					
		1	Persentase Penerimaan PAD	100	100	100	100
		2	Presentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan Dinas Perkimhubtan	75	80	85	90
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>							
Meningkatkan penanganan kawasan rawan bencana atau relokasi pembangunan Kab/kota	Terwujudnya Penanganan kawasan rawan bencana atau relokasi pembangunan Kab/kota	1	Presentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	0,60	0,65	0,70	0,70
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	0,60	0,65	0,70	0,70





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Meningkatkan penanganan dan rehabilitasi di kawasan perumahan dan Pemukiman		Meningkatnya kualitas permukiman kumuh menjadi layak huni	1	Presentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani)	0,60	0,65	0,70	0,70
			2	Berkurangnya jumlah unit RTH (rumah tidak layak huni)	0,60	0,65	0,70	0,70
Meningkatnya kualitas Parasarana dan Sarana Utilitas Perkotaan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan Utilitas Umum	100	100	100	100
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>								
Meningkatkan layanan Pemerintahan yang good governance	3	Meningkatnya pengelolaan aset tetap (tanah Pemerintah) secara baik	3	Persentase Penurunan konflik Pertanahan	100	100	100	100
	3		3	Presentase Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap	0,06	0,05	0,04	0,03





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

				diredribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maskisimum dari tanah				
			3	Presentase Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,06	0,05	0,04	0,03
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>								
Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Perhubungan yang terintegrasi	3		3	Presentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100	100	100	100
	3	Tersedianya prasarana dan sarana Perhubungan yang terintegrasi	3	Persentase Pelayanan Uji Berkala dan Keterpenuhan Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0,06	0,05	0,04	0,03
			3	Presentase Kekerasan terhadap perempuan,	0,06	0,05	0,04	0,03







## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 1.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategi merupakan strategi kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan

Dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana dinas mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.



# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Tabel T-C.26

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

### Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
<b>URUSAN PEMERINTAHANAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
Meningkatkan Kualitas tata kelola Pemerintahan Dinas PERKIMHUBTAN	1, 1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	1, 1
		<b>Sasaran : 1.2</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>			
Meningkatkan layanan Pemerintahan yang good governance	1, 3	Menurunnya Konflik Pertanahan di Kabupaten Boalemo	1, 3
		Meningkatkan Pengelolaan Aset tetap ( Tanah Pemerintah ) secara baik	3, 2
		Mewujudkan Pengelolaan Aset tetap (Tanah Pemerintah )	3, 3
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>			
<b>Tujuan : 2</b>		<b>Sasaran : 2.1</b>	





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Perhubungan yang terintegrasi	1	Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana Perhubungan yang terintegrasi	1	Mewujudkan prasarana dan sarana perhubungan yang terintegrasi	1	Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana perhubungan
	<b>Sasaran : 2.2</b>					
	2	Meningkatnya Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Mewujudkan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
	3	Meningkatnya Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusajha terintegrasi secara elektronik		Mewujudkan Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusajha terintegrasi secara elektronik		Peningkatan infrastruktur areal pelabuhan Tilamuta disesuaikan dengan Kewenangan kabupaten seperti Pemberian izin, melakukan kajian kawasan dan pengelolaan lingkungan, penataan tempat perbelanjaan untuk penumpang di area pelabuhan, dan pengelolaan lahan parkir serta unsur lainnya.
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
		<b>Sasaran : 1</b>				
Meningkatkan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1, 1	Menimngtnya kawasan perumahan permukiman yang sehat dan layak huni	1, 1	Menciptakan kawasan permukiman yang nyaman	1, 1	Pemenuhan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman
Meningkatkan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1, 2	Terwujudnya Rehabilitasi Rumah bagi korban Bencana	1, 2	Menciptakan Rehabilitasi Rumah bagi korban Bencana	1, 2	Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur kebencanaan dan pasca bencana.





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

	1, 3	Terwujudnya Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1, 3	Menciptakan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1, 3	Peningkatan penyediaan infrastruktur dan prasarana sarana utilitas umum di kawasan perumahan, kawasan permukiman, kawasan kumuh, kawasan perdesaan, dan kawasan strategis dengan memperhatikan perencanaan penataan ruang dan kelestarian lingkungan.
--	---------	--	---------	--	---------	---





## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, menangani urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar serta empat sub urusan pemerintahan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pertanahan dan perhubungan. Oleh karena itu, dalam menyusun rencana program/kegiatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo memperhatikan keterkaitan dengan urusan pemerintahan daerah dimaksud.

Rencana program/Kegiatan dan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi. Rencana program dan Indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana strategis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes/ hasil*) dari kegiatan (*output/keluaran*).

Mengacu pada gambaran data pelayanan SKPD dan kajian isu strategis yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo mempunyai beberapa Program kegiatan yang strategis untuk 4 (empat) Tahun kedepan.



Berdasarkan kebijakan diatas maka program dan kegiatan strategis yang akan dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut.

## 6.1. Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan

Adapun program dan kegiatan yang rencanakan pada bidang ini adalah :

1. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan strategis :
  - a. Pendataan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - b. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
  - e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2. Program Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh :
  - a. Pencegahan Perumahan dan kawasan permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

## 6.2. Bidang Permukiman

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada bidang ini selama 4 (empat) tahun adalah :

1. Program KAWASAN PERMUKIMAN, dengan kegiatan strategis :
  - a. Penataan dan Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan luas 10 Ha
  - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2. Program PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU), dengan kegiatan strategis :
  - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan



- b. Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

### 6.3. Bidang Pertanahan

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada bidang pertanahan selama 4 (empat) tahun adalah :

1. Program PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN, dengan kegiatan strategis :
  - a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Penyuluhan hukum pertanahan
  - d. Legalitas arsip pengadaan tanah pemerintah daerah
  - e. Monitoring evaluasi dan pelaporan
2. Program PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN, dengan kegiatan strategis :
  - a. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Monitoring evaluasi dan pelaporan
3. Program REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTIM RUGI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ATANAH ABENTEE dengan kegiatan strategis :
  - a. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu)



- b. Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Monitoring evaluasi dan pelaporan
4. Program PENGELOLAAN TANAH KOSONG, dengan kegiatan strategis :
  - a. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
  - b. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
  - c. Monitoring evaluasi dan pelaporan
5. Program PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH dengan kegiatan strategis :
  - a. Penerbitan Izin Membuka Tanah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
  - b. Monitoring evaluasi dan pelaporan
6. Program PENATAGUNAAN TANAH dengan kegiatan strategis :
  - a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota  
Penerbitan Izin Membuka Tanah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
  - b. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi
  - b. Monitoring evaluasi dan pelaporan
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - g. Penyediaan alat tulis kantor
  - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



- k. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - m. Penyediaan bahan logistik kantor
  - n. Penyediaan makanan dan minuman
  - o. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

## 6.4. Bidang Perhubungan

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada bidang perhubungan selama 4 (empat) tahun adalah :

1. Program PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), dengan kegiatan strategis :
  - a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
  - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan
  - e. Monitoring evaluasi dan pelaporan
  - f. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
9. Program PENGELOLAAN PELAYARAN, dengan kegiatan strategis :
  - a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoprasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.



c. Peningkatan infrastruktur areal pelabuhan Tilamuta disesuaikan dengan Kewenangan kabupaten

d. Monitoring evaluasi dan pelaporan

Selain dari program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo, terdapat pula program dan kegiatan penunjang yang menjadi operasional rutin kantor yang terdapat di Sekretariat yang masuk pada rencana program dan kegiatan bidang perumahan dan penataan bangunan serta bidang perhubungan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Penyediaan jasa surat menyurat
- i. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- j. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- k. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- l. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- m. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- n. Penyediaan alat tulis kantor
- o. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- p. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

- q. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - r. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - s. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - t. Penyediaan bahan logistik kantor
  - u. Penyediaan makanan dan minuman
  - v. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - d. Pengadaan mebeleur
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - i. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah.

Selengkapnya mengenai Rincian sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan Renstra beserta pagu indikatif Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel 6.1. terlampir.



# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

T-C.27

## Rencana Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Pendanaan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub. Kegiatan Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Proyeksi Capaian Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir pada akhir Kinerja Periode Renstra Peraangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

2,14		<b>URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH</b>															
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo																	
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo yang Akuntabel dan Berkinerja Baik																	
	2.14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotaka	Persentase Penyediaan Penunjang Administrasi Perkantoran di Perkimhubtan Kab. Boalemo	100	100	100	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	400	25.90	Sekretariat	Kabupaten Boalemo
	.01				0	0	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03		8.157		
							9.40	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40	9.40		.600,		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		00		
	2.14	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100	100	100	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	400	187.3		
	.01.				0	0	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1	32.1		28.70		
	2.01						75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0		0,00		
							0	0	0	0	0	0	0				





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

			Kinerja yang tepat waktu														
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	11	8	5.400.000,00	8	5.400.000,00	8	5.400.000,00	8	5.400.000,00	32	21.600.000,00			
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	5	31.232.175,00	5	31.232.175,00	5	31.232.175,00	5	31.232.175,00	20	124.928.700,00			





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	10.200,00	4	10.200,00	4	10.200,00	4	10.200,00	16	40.800,00		
2.14.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.835,00</b>	<b>100</b>	<b>5.835,00</b>	<b>100</b>	<b>5.835,00</b>	<b>100</b>	<b>5.835,00</b>	<b>400</b>	<b>23.340,328,00</b>		
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	63	63	63	5.835,00	63	5.835,00	63	5.835,00	63	5.835,00	252	23.340,200		





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

			Gaji dan Tunjangan ASN				082,00		082,00		082,00		082,00		.328,00		
	<b>2.14.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.457,143,00</b>	<b>10</b>	<b>2.457,143,00</b>	<b>10</b>	<b>2.457,143,00</b>	<b>10</b>	<b>2.457,143,00</b>	<b>400</b>	<b>9.828.572,00</b>		
	2.14.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	10	10	2.457.143,00	10	2.457.143,00	10	2.457.143,00	10	2.457.143,00	40	9.828.572,00		
	<b>2.14.01.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajid Distribusi Daerah</b>	<b>N/A</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>48</b>	<b>40.000,00</b>		
	2.14.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan	N/A	12	12	10.000,00	12	300.000,00	12	300.000,00	12	300.000,00	48	910.000,00		





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

			Wajib Retribusi Daerah														
2.14 .01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	N/A	10 0	10 0	10.5 00.0 00,0 0	10 0	10.5 00.0 00,0 0	10 0	10.5 00.0 00,0 0	10 0	10.5 00.0 00,0 0	400	42.00 0.000 ,00			
2.14. 01.2. 05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	N/ A	26	5.000 .000, 00	26	5.000 .000, 00	26	5.000 .000, 00	26	5.000 .000, 00	104	20.00 0.000 ,00			
2.14. 01.2. 05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1	1	1	5.500 .000, 00	1	5.500 .000, 00	1	5.500 .000, 00	1	5.500 .000, 00	4	22.00 0.000 ,00			





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

	<b>2.14.01.206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>400</b>	<b>860.000,00</b>		
	2.14.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	2	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8	60.000,00		
	2.14.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	40	800.000,00		
	<b>2.14.01.207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediannya Barang Milik Daerah Penunjan</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>400</b>	<b>440.000,00</b>		





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

			g Urusan Pemerintah Daerah di OPD														
2.14.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	4	120.000.000,00			
2.14.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	N/A	N/A	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	4	80.000.000,00			
2.14.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	N/A	1	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	20	200.000.000,00			





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4	40.000,00		
<b>2.14.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>220.200.000,00</b>	<b>220.200.000,00</b>	<b>220.200.000,00</b>	<b>220.200.000,00</b>	<b>220.200.000,00</b>	<b>220.200.000,00</b>	<b>400</b>	<b>880.800,00</b>		
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24	24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	96	400.000,00		





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	20.200.000,00	12	20.200.000,00	12	20.200.000,00	12	20.200.000,00	48	80.800.000,00		
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22	23	23	100.000.000,00	23	100.000.000,00	23	100.000.000,00	23	100.000.000,00	92	400.000.000,00		
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	100	100	100	27.000.000,00	100	27.000.000,00	100	27.000.000,00	100	27.000.000,00	400	108.000.000,00		





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00	4	40.000,00		
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	3	2.000,00	5	2.000,00	5	2.000,00	5	2.000,00	18	8.000,00		
2.14.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	N/A	N/A	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	4	20.000,00		





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4	40.000,00			
<b>1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN PENATAAN BANGUNAN</b>																
<b>Meningkatkan penanganan kawasan rawan bencana atau relokasi pembangunan Kab/kota</b>																
Terwujudnya Penanganan kawasan rawan bencana atau relokasi pembangunan Kab/kota																
1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Presentase rehabilitasi rumah korban bencana</b>	<b>3,01</b>	<b>3</b>	<b>2,8</b>	<b>750.000,00</b>	<b>2,6</b>	<b>756.253.550,00</b>	<b>2,4</b>	<b>762.663.400,00</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>769.233.550,00</b>	<b>3.038.150.500,00</b>	<b>Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan</b>	<b>Kabupaten Boalemo</b>





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

1.04 .02. 2.01	Pendataan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kot a	Presentas e pendataa n penyediaa n dan Rehabilita si Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupate n/Kota	N/A	10 0	10 0	100. 000. 000, 00	10 0	100. 000. 000, 00	10 0	100. 000. 000, 00	10 0	100. 000. 000, 00	400	400.0 00.00 0,00		
1.04. 02.2. 01.0 1	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen data rumah dilokasi rawan bencana terkena Relokasi dan lokasi yang berpotensi terkena Relokasi program kabupaten /kota	1	1	1	100.0 00.00 0,00	1	100.0 00.00 0,00	1	100.0 00.00 0,00	1	100.0 00.00 0,00	4	400.0 00.00 0,00		





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

1.04.02.2.02	Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	100	100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400	400.000,00		
1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan pelatihan Tim Satgas, tim pendamping dan Fasilitator	Jumlah orang pada tim satgas, tim pendamping, dan fasilitator yang terbentuk dan terlatih	ORANGAN	ORANGAN	15 Orang	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	#VALUE!	400.000,00		
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Presentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	N/A	N/A	1	450.000,00	456.250,00	462.663,00	462.663,00	462.663,00	462.663,00	469.233,00	4	1.838.150,00		





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

	Kabupaten/Kota	atau Relokasi Program Kabupaten/Kota															
1.04.02.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi korban Bencana	Jumlah Rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota yang terhabilitasi.	10 Unit	10 Unit	8 Unit	400.000,00	8 Unit	400.000,00	8 Unit	400.000,00	8 Unit	400.000,00	#VALUE!	1.600.000,00			
1.04.02.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau detail engineering (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Pprogram Kabupaten/Kota	Penyusunan Site Plan dan/atau detail engineering (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Pprogram Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	50.000,00	1 Dokumen	56.253.550,00	1 Dokumen	62.663.400,00	1 Dokumen	69.233.550,00	#VALUE!	238.150.500,00			





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

1.04	2.03	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Presentas e Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	N/A	N/A	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	4	400.000,00		
1.04	2.07.01	Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Laporan	Laporan	1 Laporan	100.000,00	#VALUE!	400.000,00								
1.04		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERMUKIMAN</b>															
Meningkatkan penanganan kawasan rawan bencana atau relokasi pembangunan Kab/kota																	
Terwujudnya Penanganan kawasan rawan bencana atau relokasi pembangunan Kab/kota																	





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

1.04 .03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Presentas e kawasan permuki man kumuh di bawah 10 Ha di kabupate n/kota yang ditangani	0,7 5	0,7 5	0,7 3	1.54 1.84 7.70 0,00	0,7	1.55 4.70 3.80 0,00	0,6 5	1.56 7.88 1.25 0,00	0,6	1.58 1.38 8.10 0,00	0,6	6.245 .820. 850,0 0	Bid ang Per mu kim an	Ka bu pat en Bo ale mo
1.04 .03. 2.02	Penataan dan Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan luas 10 Ha	Persentas e Penataan dan Peningkat an kualitas Kawasan Permuki man kumuh dengan luas 10 Ha	0,7 5	0,7 5	0,7 3	1.54 1.84 7.70 0,00	0,7	1.55 4.70 3.80 0,00	0,6 5	1.56 7.88 1.25 0,00	0,6	1.58 1.38 8.10 0,00	9,8	6.245 .820. 850,0 0		
1.04 .03. 2.02 .01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumaha n dan	1 DO KU ME N	1 DO KU ME N	1 DO KU ME N	770. 923. 850	1 DO KU ME N	777. 351. 900	1 DO KU ME N	783. 940. 625	1 DO KU ME N	790. 694. 050	#VALUE!	3.122 .910. 425,0 0		





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

		Permukiman Kumuh														
1.04 .03. 2.02 .02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	100 Unit	10 Unit	90 Unit	770.923.850	91 Unit	777.351.900	91 Unit	783.940.625	92 Unit	790.694.050	#VALUE!	3.122.910.425,00		
<b>1.04 .04</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KUMUH</b>	<b>Presentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.246.467.200,00</b>	<b>100</b>	<b>2.265.198.400,00</b>	<b>100</b>	<b>2.284.397.950,00</b>	<b>100</b>	<b>2.304.077.400,00</b>	<b>100</b>	<b>9.100.140.950,00</b>	<b>Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan</b>	<b>Kabupaten Boalemo</b>





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan kawasan permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman	Unit	unit	88	2.24 6.46 7.20 0,00	92	2.26 5.19 8.40 0,00	96	2.28 4.39 7.95 0,00	100	2.30 4.07 7.40 0,00	376	9.100 .140. 950,0 0		
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pengecekan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk pengecekan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	50 Unit	50 Unit	44 Unit	2.246 .467. 200,0 0	45 Unit	2.265 .198. 400,0 0	45 Unit	2.284 .397. 950,0 0	46 Unit	2.304 .077. 400,0 0	#VALUE!	9.100 .140. 950,0 0		





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

			dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha														
1.04.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)</b>	<b>Persentase Peningkatan Prasarana dan Utilitas (PSU)</b>	<b>11,29</b>	<b>11,1</b>	<b>10,9</b>	<b>4.074.836.800,00</b>	<b>10,6</b>	<b>4.108.813.100,00</b>	<b>10,2</b>	<b>4.143.638.750,00</b>	<b>9,8</b>	<b>4.179.335.100,00</b>	<b>9,8</b>	<b>16.506.623.750,00</b>	<b>Bidang Perumahan</b>	<b>Kabupaten Boalemo</b>	
1.04.05.2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>23,53</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>4.074.836.800,00</b>	<b>40</b>	<b>4.108.813.100,00</b>	<b>45</b>	<b>4.143.638.750,00</b>	<b>50</b>	<b>4.179.335.100,00</b>	<b>170</b>	<b>16.506.623.750,00</b>			
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana sarana dan utilitas umum	Lokasi (7 Kecamatan)	Lokasi (7 Kecamatan)	Lokasi (7 Kecamatan)	3.574.836.800,00	Lokasi (7 Kecamatan)	3.608.813.100,00	Lokasi (7 Kecamatan)	3.643.638.750,00	Lokasi (7 Kecamatan)	3.679.335.100,00	<b>#VALUE!</b>	<b>14.506.623.750,00</b>			





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

			yang menunjang fungsi hunian														
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana sarana dan utilitas umum perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan	1 laporan (seluruh aspek)	1 laporan (seluruh aspek)	1 laporan (seluruh aspek)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	#VALUE!	2.000.000,00				
<b>1.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi</b>	<b>11,29</b>	<b>11,1</b>	<b>10,9</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>400.000,00</b>	<b>Bidang Perumahan dan Pertanahan</b>	<b>Ban</b>	<b>Kabupaten Boalemo</b>	





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

			Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman													gunan
1.04	2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Keci	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan	23,53	30	35	100.000,00	40	100.000,00	45	100.000,00	50	100.000,00	170	400.000,00	





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

			Jumlah laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat dan Registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil	1	1	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	#VALUE!	400.000,00		
1.04	.06	2.01	.01	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat dan Registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan				
<b>2 URUSAN</b> <b>. PEMERINTAHAN</b> <b>1 BIDANG PERTANAHAN</b> <b>0</b>																	
<b>Meningkatkan layanan Pemerintahan yang good governance</b>																	
<b>Meningkatnya tata kelola dan pelayanan pertanahan</b>																	
2.10	.04	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>		<b>Persentase Penurunan konflik Tanah Garapan yang</b>	14,29	14,29	28,57	87.095.500,00	42,86	90.323.100,00	71,43	93.631.450,00	100	97.022.450,00	368.072.500,00	<b>Bidang Per</b>	<b>Kabu</b>
				<b>Garapan yang</b>											<b>tan</b>	<b>pat</b>	
															<b>aha</b>	<b>en</b>	
															<b>n</b>	<b>Bo</b>	
															<b>ale</b>	<b>mo</b>	





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

			tertangan i														
	2.10 .04. 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Penyelesa ian Konflik Konflik Pertanaha n yang tertangan i	100	10 0	10 0	87.0 95.5 00,0 0	10 0	90.3 23.1 00,0 0	10 0	93.6 31.4 50,0 0	10 0	97.0 22.4 50,0 0	400	368.0 72.50 0,00		
	2.10 .04. 201	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Penyelesai an Konflik Konflik Pertanaha n yang tertangani	1 Dok um en	1 Do ku me n	1 Do ku me n	87.09 5.500 ,00	1 Do ku me n	90.32 3.100 ,00	1	93.63 1.450 ,00	1	97.02 2.450 ,00	#VALUE!	368.0 72.50 0,00		
	2.10 .04. 201. 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesai an Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah	5 Ber ita Aca ra	5 Ber ita Ac ara	5 Ber ita Ac ara	87.09 5.500 ,00	5 Ber ita Ac ara	90.32 3.100 ,00	5 Ber ita Ac ara	93.63 1.450 ,00	5 Ber ita Ac ara	97.02 2.450 ,00	#VALUE!	368.0 72.50 0,00		





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

			Kabupaten/Kota													
<b>2.10.05</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah yang tertangani</b>	<b>14,29</b>	<b>14,29</b>	<b>28,57</b>	<b>254.838.200,00</b>	<b>42,86</b>	<b>256.129.250,00</b>	<b>71,43</b>	<b>257.452.550,00</b>	<b>100</b>	<b>258.808.950,00</b>	<b>100</b>	<b>1.027.228.950,00</b>	<b>Bidang Perumahan</b>	<b>Kabupaten Boalemo</b>
2.10.05.201	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah tertangani	100	100	100	254.838.200,00	100	256.129.250,00	100	257.452.550,00	100	258.808.950,00	400	1.027.228.950,00		







# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

			Absentee yang tertangan i														
	2.10 .06. 201	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kab.Kota	1 Dokumen	100	100	25.000,00	100	25.000,00	100	25.000,00	100	25.000,00	400	100.000,00		
	2.10 .06. 201. 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000,00	#VALUE!	100.000,00								





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

		Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
2.10.06.202	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i> Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i> Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	#VALUE!	100.000.000,00								
2.10.06.202.02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	#VALUE!	100.000.000,00								





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

		Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
	<b>2.10.08</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>Persentase Pengelolaan Tanah Kosong</b>	<b>60%</b>	<b>14,29</b>	<b>28,57</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42,86</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Bidang Perumahan</b>	<b>Kabupaten Boalemo</b>
	2.10.08.201	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Penyelesaian Tanah Kosong	1 Dokumen	100	100	25.000,00	100	25.000,00	100	25.000,00	100	25.000,00	400	100.000,00		
	2.10.08.201.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000,00	1 Dokumen	25.000,00	1 Dokumen	25.000,00		25.000,00	#VALUE!	100.000,00		





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

	2.10.08.202	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Data Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	100	100	25.000,00	100	25.000,00	100	25.000,00	100	25.000,00	400	100.000,00		
	2.10.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000,00	1 Dokumen	25.000,00	1 Dokumen	25.000,00	1 Dokumen	25.000,00	#VALUE!	100.000,00		
	<b>2.10.09</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah yang tertangani</b>	100%	100%	100%	<b>50.000,00</b>	<b>42,86</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Bidang Perumahan</b>	<b>Kabupaten Boalemo</b>
	2.10.09.201	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Izin membuka tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	#VALUE!	200.000,00		
	2.10.09.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000,00	1 Dokumen	50.000,00	1 Dokumen	50.000,00	1 Dokumen	50.000,00	#VALUE!	200.000,00		





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

			rangka Pemberian Izin Membuka Tanah														
2.10.10	<b>PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH</b>	<b>Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah yang terinventarisir</b>	<b>14,29</b>	<b>14,29</b>	<b>28,57</b>	<b>154.838.200,00</b>	<b>42,86</b>	<b>156.129.250,00</b>	<b>71,43</b>	<b>157.452.550,00</b>	<b>100</b>	<b>158.808.950,00</b>	<b>100</b>	<b>627.228.950,00</b>	<b>Bidang Perantaha n</b>	<b>Ka bu pat en Bo ale mo</b>	
2.10.10.201	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tanah Pemerintah Daerah yang terinventarisir	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	400	400.000.000,00			
2.10.10.201.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	#VALUE!	400.000.000,00			





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

			dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
2.10.10.702	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Jumlah Dokumen Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54.838.200	1 Dokumen	56.129.250	1 Dokumen	57.452.550	1 Dokumen	58.808.950	#VALUE!	227.228.950,00			
2.10.10.702.01	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Jumlah Dokumen Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54.838.200,00	1 Dokumen	56.129.250,00	1 Dokumen	57.452.550,00	1 Dokumen	58.808.950,00	1 Dokumen	227.228.950,00			
<b>2,15</b>	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>																
<b>Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Perhubungan yang terintegrasi</b>																	
<b>Tersediaan prasarana dan sarana Perhubungan yang terintegrasi</b>																	
2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Presentase perlengkapan di Jalan Kabupaten</b>	N/A	N/A	61	362.602.000,00	62	365.625.400,00	63	368.724.400,00	64	371.900.850,00	250	1.468.852.650,00	<b>Bidang Perhubungan</b>	<b>Kabupaten Boalemo</b>	





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

			n/kota tersedia														ale mo
2.15.02.2.02.02	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	N/A	37	37	362.602.000,00	37	365.625.400,00	37	368.724.400,00	37	371.900.850,00	148	1.468.852.650,00			
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tereadia	14 Unit	14 Unit	14 Unit	104.000,00	46 Unit	137.500,00	28 Unit	140.500,00	30 Unit	143.500,00	#VALUE!	525.500,00			
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan	2 Orang	2 Orang	3 Orang	150.000,00	2 Orang	120.000,00	2 Orang	120.000,00	2 Orang	120.000,00	#VALUE!	510.000,00			





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

			Kapasitasnya														
2.15 .02. 2.05 .07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Terpelihara	10 Unit	10 Unit	15 Unit	108.602.000,00	15 Unit	108.125.400,00	15 Unit	108.224.400,00	15 Unit	108.400.850,00	#VALUE!	433.352.650,00			
<b>2.15 .03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Presentase Pengelolaan pelayaran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1001</b>	<b>71.138.300,00</b>	<b>100</b>	<b>71.731.550,00</b>	<b>100</b>	<b>72.339.500,00</b>	<b>100</b>	<b>72.962.700,00</b>	<b>1301</b>	<b>288.172.050,00</b>	<b>Bidang</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Boalemo</b>
2.15 .03. 2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoprasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah	Presentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoprasian Untuk Kapal	100	100	100	18.270.000,00	100	35.865.775,00	100	36.169.750,00	100	36.481.350,00	300	126.786.875,00			





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Kabupaten/Kota	Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota															
2.15 .03. 2.07 .02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujui ya Pengoprasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/kota	1 Lap ora n	1 Lap ora n	1 Lap ora n	18.27 0.000 ,00	35.86 5.775 ,00	36.16 9.750 ,00	36.48 1.350 ,00	#VALUE!	126.7 86.87 5,00					





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

2.15 .03. 2.14	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pelatihan	2 Lap ora n	1 La por an	2 La por an	52.8 68.3 00,0 0	1 La por an	35.8 65.7 75,0 0	1 La por an	36.1 69.7 50,0 0	1 La por an	36.4 81.3 50,0 0	#VALUE!	161.3 85.17 5,00		
2.15 .03. 2.14 .02	Koordinas dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpang Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpa	2 Lap ora n	1 Lap ora n	2 Lap ora n	52.86 8.300 ,00	1 Lap ora n	35.86 5.775 ,00	1 Lap ora n	36.16 9.750 ,00	1 Lap ora n	36.48 1.350 ,00	#VALUE!	161.3 85.17 5,00		







Dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang perlu dianalisa pengukuran pencapaian kinerja sehingga data kinerja yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), formula pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo menggunakan beberapa metode pengukuran yaitu :

1. Prosentase adalah bagian dari keutuhan yang dinyatakan dengan persen atau bagian yang diperkirakan dengan menggunakan angka persen
2. Jumlah adalah menghitung beberapa banyak tentang sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu dalam artiannya mengukur menggunakan metode angka.
3. Rasio adalah mengukur tingkat ketmpangan atau kesenjangan secara menyeluruh,

Selengkapnya mengenai rincian formula pengukuran capaian indikator kinerja, program dan kegiatan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel 6.2. terlampir.



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bagian ini dikemukakan indikator kinerja SOPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SOPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Keterkaitan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan RPD Kabupaten Boalemo tahun 2023-2026, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo termasuk dalam Misi I, Mewujudkan Perekonomian Boalemo yang Handal dan Berdaya Saing, adalah upaya untuk mewujudkan perekonomian melalui pengembangan agribisnis secara terpadu dan kompetitif dengan membangun sistem produksi, distribusi, dan pemasaran termasuk pelayanan jasa. Pengembangan agribisnis tersebut bertumpu pada kompetensi inti daerah yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan pertambangan dan energi, industri pengolahan, dan pariwisata secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam tabel 7.1. di bawah ini.



# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

T-C.28

## Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo Kabupaten Boalemo

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2021)	Proyeksi Capaian Tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>							
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH</b>							
	<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo</b>							
I	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A Persen	57 Persen	57 Persen	60 Persen	63 Persen	66 Persen	246 Persen
	<b>Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Akuntabel dan Berkinerja Baik</b>							
1	Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	BB Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	A Predikat	A Predikat
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat /BPK/BPKP	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	400 Persen
3	Persentase Barang Milik Daerah dalam	85 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	320 Persen





# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

	Keadaan Baik di Lingkungan OPD							
4	Persentase Penerimaan PAD	N/A Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	400 Persen
5	Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan Dinas Perkimhubtan Kab. Boalemo	66,67 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	330 Persen
6	Persentase Penyediaan Penunjang Adminitrasi Perkantoran di Dinas Perkimhubtan Kab. Boalemo	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	400 Persen
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN PENATAAN BANGUNAN</b>								
<b>Meningkatkan penanganan dan rehabilitasi di kawasan perumahan dan Permukiman</b>								
II	Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	0,75 Persen	0,75 Persen	0,73 Persen	0,7 Persen	0,65 Persen	0,6 Persen	2,68 Persen
<b>Meningkatnya kualitas permukiman kumuh menjadi layak huni</b>								
1	Persentase Penataan Bangunan dan lingkungan di kawasan perkotaan dan pedesaan di lingkungan masyarakat	Persen	59 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	75 Persen
2	Persentase lingkungan perumahan yang sehat	Persen	100 Persen	100 Persen	97,60 Persen	98,20 Persen	98,80 Persen	394,6 Persen
3	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	80 Persen	0,60 Persen	0,60 Persen	0,65 Persen	0,70 Persen	0,70 Persen



# RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

4	Rasio Permukiman layak huni	Persen	80 Persen	0,60 Persen	0,60 Persen	0,65 Persen	0,70 Persen	0,70 Persen
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>								
<b>Meningkatkan layanan Pemerintahan yang good governance</b>								
III	Konflik Pertanahan	Persen	66 Persen	68 Persen	70 Persen	72 Persen	74 Persen	284 Persen
<b>Meningkatnya tata kelola dan pelayanan pertanahan</b>								
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	290 Persen
2	Prosentase Tanah milik Pemda yang bersertifikat	N/A Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	290 Persen
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>								
<b>Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Perhubungan yang terintegrasi</b>								
1	Rasio Rambu Lalu Lintas, wrning light, trafic, guadril,deniator,RPPJ, paku jalan	Persen	25 Persen	50 Persen	75 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	Pembangunan Lokasi Rest Area	Persen	25 Persen	50 Persen	75 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
3	Pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	60 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	270 Persen
4	Jumlah Terminal	Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	12 Unit
5	Prosentase Terminal yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	400 Persen





# RENSTRA 2023-2026

*Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo*





## BAB VIII PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu menengah Tahun 2023-2026 melalui Rencana Strategis yang diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi standar kebutuhan masyarakat. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo merupakan:

1. Perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo
2. Program-program yang disusun merupakan penjabaran atas kebijakan yang telah ditentukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo, yang kemudian disesuaikan dengan pembagian program berdasarkan urusan wajib pemerintahan tanpa mengesampingkan kebijakan internal OPD dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Keberadaan Rencana Strategis pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo diharapkan dapat dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala tiap tahunnya melalui Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
4. Komitmen dan motivasi antara pemerintah melalui OPD terkait dengan stakeholder dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Boalemo



## RENSTRA 2023-2026

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo

Demikianlah penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo tahun 2023-2026 yang merupakan pedoman dan arahan bersama bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo serta terpadu dan searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Boalemo selama empat tahun mendatang.

**Tilamuta, Januari 2022**

**KABUPATEN BOALEMO**  
**DISPERKIMHUBTAN**  
**SYAFRUDIN KADIR LAMUSU, SE.MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19711023 200012 1 003**

